

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN BEBAS ACFTA DI
INDONESIA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO**

TAHUN 2019-2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SHEREMA

20323137

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN BEBAS ACFTA DI
INDONESIA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO**

TAHUN 2019-2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SHEREMA

20323137

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN BEBAS ACFTA DI
INDONESIA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO
TAHUN 2019-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

22/11/2024

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi




Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St.,M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

19, November 2024



Sherema

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	16
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 DINAMIKA PERKEMBANGAN ACFTA DI INDONESIA	19
2.1 Aktivitas Perdagangan Bebas ACFTA di Indonesia pada 2019 hingga 2023	19
2.2 Upaya Peran Diplomasi Pemerintahan Indonesia di Dalam ACFTA ..	30
BAB 3 ANALISIS MOTIF INDONESIA MENGIMPLEMENTASIKAN ACFTA SAMPAI SEKARANG	36
3.1. Motivasi Politik Perdagangan Internasional	36
3.1.1. Faktor Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Kepercayaan	36
3.1.2. Faktor Regionalisme Sebagai Imbalan Bagi Mitra Keamanan	39
3.1.3. Faktor Kerja Sama Ekonomi Regional dan Agenda Keamanan Baru	40
3.1.4. Faktor Regionalisme Sebagai Alat Tawar Menawar	43
3.1.5. Regionalisme Sebagai Mekanisme Untuk Mengunci Reformasi	45

3.1.6. <i>Regionalisme Untuk Memenuhi Tuntutan Timbal Balik</i>	47
3.1.7. <i>Kemudahan Negosiasi dan Implementasi Perjanjian ACFTA</i>	50
3.2. Motivasi Ekonomi Regionalisme	54
3.2.1. <i>Alasan ekonomi dalam memilih regionalisme dibandingkan multilateralisme regionalisme memungkinkan perlindungan berkelanjutan terhadap sektor-sektor yang tidak dapat bertahan dalam persaingan global.</i>	54
3.2.2. <i>Regionalisme memberikan peluang untuk ‘integrasi yang lebih dalam’</i>	56
3.2.3. <i>Alasan ekonomi untuk lebih memilih regionalisme daripada unilateralisme atau status quo Pasar yang lebih besar dan peningkatan investasi asing</i>	58
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Rekomendasi	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 10 Komoditas Utama Ekspor Dan Impor Indonesia-Tiongkok November 2019, Nilai Ekspor Dan Impor (FOB) Dalam USD	20
Tabel 2. 10 Komoditas Utama Ekspor Dan Impor Indonesia – Tiongkok 2020, Nilai Ekspor Dan Impor (FOB) Dalam USD.	21
Tabel 3. 10 Komoditas Utama Perdagangan Bebas Ekspor-Impor Indonesia 2023, Nilai Ekspor Dan Impor (FOB) Dalam USD.	24
Tabel 4. Neraca Perdagangan Indonesia – Tiongkok 2019-2023 (Januari-Maret), Nilai Ekspor Dan Impor (FOB) Dalam USD Juta.....	26
Tabel 5. 10 Produk Ekspor Non-Migas Utama Indonesia – Asean Tahun 2019-2023 (Januari-Agustus), Nilai Ekspor (FOB) Dalam USD Juta.....	26
Tabel 6. 10 Produk Impor Non-Migas Utama Indonesia – Asean Tahun 2019-2023 (Januari-Agustus), Nilai Impor (CIF) Dalam USD Juta.....	28
Tabel 7. Neraca Perdagangan Asean-Tiongkok 2019-2023, Nilai Ekspor Dan Impor (FOB) Dalam USD Miliar	29
Tabel 8. Data Perdagangan Ekspor Indonesia – Tiongkok 2019-2023, Nilai Ekspor Dalam Juta US\$.....	36
Tabel 9. Motivasi Politik Perjanjian Perdagangan Internasional.....	60
Tabel 10. Motivasi Ekonomi untuk Regionalisme.	63

DAFTAR SINGKATAN

ACFTA: *ASEAN-China Free Trade Area*

ASEAN: *Associations of Southeast Asian Nations*

ROO: *Rules Of Origin*

COC: *Code of Conduct*

KTT: *Konferensi Tingkat Tinggi*

BRI: *Belt and Road Initiative*

PLTS: *Pembangkit Listrik Tenaga Surya*

MoU: *Memorandum of Understanding*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan perdagangan bebas ASEAN-China *Free Trade Area* di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2023). ACFTA, yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok, bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif, serta meningkatkan akses pasar dan investasi. Masalah yang diangkat adalah bagaimana Indonesia mengimplementasikan ACFTA dalam konteks peningkatan perdagangan dan investasi asing. Teori Bentuk Kerja sama Perdagangan Internasional menjadi alat dalam membedah penelitian ini, dimanah dalam teori menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama perdagangan internasional melalui regionalisme. Meskipun ACFTA memberikan peluang besar dalam meningkatkan ekspor dan menarik investasi, tetapi implementasinya masih menghadapi segudang tantangan terkait ketidaktahuan masyarakat dan resistensi dari berbagai sektor industri. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pro dan kontra terkait kebijakan ACFTA, Indonesia telah melakukan langkah konkret dalam memaksimalkan manfaat perjanjian ini melalui peningkatan kerja sama ekonomi dengan negara-negara di ASEAN dan Tiongkok. Berfokus pada upaya perluasan pasar ekspor dan menarik investasi asing, Pemerintah Indonesia melakukan upaya dengan mengoptimalkan kebijakan yang mendukung penghapusan tarif dan hambatan non-tarif. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan yang menjadi hambatan, kebijakan ACFTA berpotensi meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Kata-kata kunci: ACFTA, Perdagangan bebas, Investasi Asing, Joko Widodo.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the ASEAN-China Free Trade Area policy in the era of President Joko Widodo's administration (2019-2023). ACFTA, which involves ASEAN member states and China, aims to reduce or eliminate trade barriers, including tariffs and non-tariff barriers, and improve market access and investment. The issue raised is how Indonesia implements ACFTA in the context of increasing trade and foreign investment. The Theory of International Trade Cooperation becomes a tool in dissecting this research, which in theory explains how the form of international trade cooperation through regionalism. Although ACFTA provides great opportunities in increasing exports and attracting investment, its implementation still faces a myriad of challenges related to public ignorance and resistance from various industrial sectors. The findings of this study show that despite the pros and cons of the ACFTA policy, Indonesia has taken concrete steps to maximize the benefits of this agreement through increased economic cooperation with countries in ASEAN and China. Focusing on efforts to expand the export market and attract foreign investment, the Indonesian government made efforts by optimizing policies that support the elimination of tariffs and non-tariff barriers. This study concludes that despite the challenges, the

ACFTA policy has the potential to improve Indonesia's economic competitiveness in the global arena.

Keywords: ACFTA, Free Trade, Foreign Investment, Joko Widodo.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Liberalisasi perdagangan bertujuan untuk menekankan pentingnya penerapan sistem perdagangan bebas tanpa hambatan, dengan intervensi pemerintah yang minimal. Hal ini memungkinkan aliran produk yang diperdagangkan lebih lancar dari satu negara ke negara lainnya (Lubis and Nuryanti 2011). Perjanjian Perdagangan Bebas *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) adalah salah satu perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan Indonesia dan Tiongkok (Widyasanti 2010). *ASEAN- Free Trade Area* (ACFTA) sebuah kawasan perdagangan bebas yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk memfasilitasi perdagangan bebas dengan mengurangi atau menghilangkan sepenuhnya hambatan perdagangan seperti tarif maupun hambatan non-tarif. ACFTA juga berperan dalam peningkatan akses pasar jasa, ketentuan dan peraturan investasi, bersamaan dengan eskalasi bagian kerja sama ekonomi guna mendorong hubungan perekonomian anggota bagian ACFTA dalam skema untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (Julina 2022).

Pembentukan ACFTA dimulai ketika perwakilan kepala negara dari anggota ASEAN dan juga Tiongkok menandatangani perjanjian *ASEAN-Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Hubungan kerja sama semakin diperdalam sebelum ditandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* untuk membangun *ASEAN- Free Trade Area* (ACFTA) baru dimulai

pada tanggal 1 Januari 2010 bagi 6 negara ASEAN yaitu: Indonesia, Filipina, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam dalam menurunkan bahkan menghilangkan hambatan tarif di dalam negerinya. Melalui perkembangan kerja sama tersebut, ada kemungkinan bahwa perjanjian ACFTA ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (Nugraha 2018).

Setelah ditandatangani pada 1 Januari 2010, ACFTA mendapatkan pengesahan kembali pada tanggal 12 November 2017 sebagai proses perjanjian ulang dan dilaksanakan sepenuhnya mulai tanggal 1 Agustus 2019 melalui *Upgrading Protocol* ACFTA. Dengan adanya ACFTA, melalui penghapusan tarif sebesar 94,6% terhadap semua jalur tarif berlaku untuk ekspor Indonesia ke Tiongkok, dan kemungkinan barang keluar-masuk di negara-negara yang tergabung. Barang-barang yang berasal dari anggota ACFTA yang dibawa masuk ke Indonesia dari negara-negara ASEAN atau Tiongkok dan diekspor kembali ke negara-negara tersebut, tanpa tindakan proses di Indonesia, dapat menikmati kebebasan tarif (ACFTA 2019).

Seperti yang kita ketahui, Tiongkok merupakan negara dengan pendapatan per kapita terbesar kedua setelah Amerika Serikat, dan Juga memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia (Nadya et al 2018). Hadirnya Perdagangan ACFTA di Indonesia tentunya akan berdampak negatif dan positif bagi Indonesia. Disahkannya ACFTA pada 2010 banyak mendapat respons negatif dan positif. Awal diberlakukannya perjanjian ini ditanggapi oleh berbagai argumen, banyaknya pendapat pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat, pelaku usaha, bahkan komisi VI DPR RI. ACFTA lebih banyak mendapat argumen yang menjurus kepada kontra dibandingkan pendapat pro. Sebagian besar masyarakat

Indonesia kurang mengetahui tentang kesepakatan ACFTA. Melalui survei yang dibuktikan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan Mei 2010, memaparkan hanya sekitar 26,7 persen masyarakat yang pernah mendengar tentang ACFTA, sedangkan 69,4 persen sisanya tidak mengetahui kesepakatan ACFTA (Kartikasari, 2010). Kurangnya informasi yang berkaitan dengan ACFTA pada masyarakat diakibatkan karena pemerintah belum sepenuhnya transparan kepada masyarakat Indonesia (Kartikasari 2010).

Pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ribuan buruh melakukan unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan melalui (Kompas 24/02/2010) banyaknya buruh yang melakukan penolakan pada pemberlakuan ACFTA dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda pemberlakuan ACFTA, mereka mengatakan bahwa selama ini mereka tidak pernah mendapatkan pengarahan atau persiapan terhadap rencana kerja ACFTA seperti melalui sosialisasi dari pemerintah. Begitu juga dengan para pengusaha Indonesia banyak yang mengeluhkan bahwa mereka kurang mendapat informasi dalam kesepakatan ACFTA, baik sesudah maupun sebelum ACFTA disahkan. Komisi VI DPR RI juga merasa keberatan dengan adanya pemberlakuan kawasan perdagangan ACFTA. Dalam rapat kerja sama dengan kerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertepatan di gedung DPR, Jakarta 2009. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima berpendapat bahwa dengan adanya pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas tersebut berdampak pada 10 sektor yaitu, sektor-sektor pertanian dan perkebunan, manufaktur dan plastik, tekstil, industri permesinan, makanan dan minuman, alas kaki, petrokimia, elektronik khususnya kabel dan peralatan listrik, jasa *Engineering*, dan industri baja.

Permasalahan tersebut membuat beberapa masyarakat, pengusaha, dan komisi VI DPR RI mendesak pemerintah harus menegosiasikan ulang menyangkut pelaksanaan ACFTA. Negosiasi ulang dianggap perlu dilakukan karena adanya indikasi persaingan yang tidak adil menurut hasil survei kementerian Perindustrian (Kemenperin 2009).

Lepas dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masuk pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ACFTA kembali menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Indonesia sempat menolak menandatangani Protokol Peningkatan ACFTA 2015, tetapi sikap Indonesia yang menolak meratifikasi Protokol untuk mengubah ACFTA (2015) berakhir pada bulan November 2018, Presiden Joko Widodo akhirnya meratifikasi “Protokol untuk Mengubah Kerangka Kerja Kesepakatan tentang kerja sama Ekonomi Komprehensif dan beberapa Kesepakatan di bawahnya antara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok(2015), (Julina 2022). Pada tahun 2015 di mana bertepatan dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, ACFTA kembali ditandatangani pada tanggal 12 November 2017 melalui *Upgrading Protocol* ACFTA. ASEAN dan Tiongkok menandatangani ulang *Upgrading Protocol* untuk menyempurnakan perjanjian kerangka kerja awal untuk kawasan perdagangan bebas ACFTA (Julina 2022).

Walaupun ACFTA sendiri menuai banyak argumen pro dan kontra di Indonesia, Pemerintahan Indonesia tetap optimis dan yakin bahwa dengan adanya ACFTA Indonesia mampu bersaing dengan mendapatkan keuntungan dalam skema kerja sama tersebut (Nawawi 2010). ACFTA sendiri memberikan peluang bagi Indonesia dalam mendapatkan pangsa pangan yang lebih luas, yang dimanah

hal ini tentunya akan membuka peluang bagi produsen Indonesia dalam memasuki produk ke Tiongkok. Karena Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang tinggi di dunia (Ika 2011). Dengan diberlakukannya ACFTA, para anggota ASEAN mendapatkan akses untuk masuk ke pasar domestik Tiongkok dengan jangkauan yang luas dan besar, memberikan peluang pada penguatan ekspor dengan jenjang tarif yang lebih rendah.

Lewat pertemuan tersebut dilaksanakannya pembatasan dan perumusan serta langkah-langkah yang efektif agar dapat meningkatkan perdagangan antar Indonesia dan bersamaan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dalam seluruh rangkaian pertemuan ini dilaksanakan dengan membahas isu seperti; kerja sama perdagangan, tarif, penghapusan non-tarif investasi, hingga promosi investasi. Melalui hasil negosiasi antara Indonesia dan bersamaan dengan negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia berupaya agar mendapat manfaat yang semaksimal mungkin dari pemberlakuan ACFTA. Dan juga membuktikan bahwa dengan diberlakukannya ACFTA ini berjalan sejalan dengan kepentingan dan kebijakan ekonomi nasional.

Dalam hal ini penelitian ini memiliki fokus utama yaitu membahas sisi implementasi kebijakan perdagangan bebas ACFTA di Indonesia masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2023). Dengan mengutamakan aspek implementasi, penelitian ini akan membahas bagaimana upaya konkret yang dilakukan Indonesia dalam menerapkan perjanjian ACFTA melalui peningkatan perdagangan dan investasi asing. Dimanah hal ini akan membuka pandangan mengenai sejauh mana kesepakatan ini akan berdampak pada dinamika ekonomi Indonesia, dan bagaimana negara ini menyelaraskan antara regulasi dan tindakan

ekonomi internal dengan ketentuan-ketentuan ACFTA. Serta untuk melihat apa yang menjadikan pemerintah tetap mengimplementasikan ACFTA secara penuh pada 2019 -2023.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi perdagangan bebas ACFTA di Indonesia masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk memenuhi beberapa hal masing-masing diantaranya:

1. Untuk melihat sejauh mana implementasi ACFTA berpengaruh pada dinamika ekonomi Indonesia.
2. Untuk melihat apa yang menjadikan Pemerintah Indonesia tetap mengimplementasikan ACFTA secara penuh di Indonesia pada 2019-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada wujud implementasi kebijakan perdagangan bebas ACFTA di Indonesia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peran dan aktivitas implementasi kebijakan perdagangan bebas ACFTA di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ACFTA disahkan. Selain itu juga jangka waktu yang diambil dibatasi sejak 2019 sampai 2023. Tahun 2019 digunakan sebagai acuan awal karena ACFTA di baru di implementasikan secara penuh di Indonesia pada tahun 2019.

Tahun 2023 dipilih sebagai batasan akhir, karena peneliti ingin melihat dari awal ACFTA diimplementasikannya sampai saat ini pada tahun 2023. Dengan melihat penerapan perjanjian ACFTA yang dilakukan pada masa Presiden Joko Widodo. Karena itu menjadi daya tarik penelitian ini, untuk membatasi objek penelitian dan berfokus lebih dalam melihat proses implementasi kebijakan terhadap ACFTA di Indonesia masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019-2023.

1.5 Tinjauan Pustaka

Banyaknya literatur yang mengkaji terkait permasalahan perdagangan bebas ACFTA pada isu tersebut. Berikut peneliti akan memaparkan beberapa literatur dari penelitian terdahulu yang mengnyangkut implementasi kebijakan terhadap ACFTA dengan memberikan rangkuman berdasarkan literatur yang ada, adapun literatur penelitian tersebut diantara-Nya:

Pada Jurnal pertama tinjauan pustaka melalui jurnal yang ditulis Wezi Tresia O yang berjudul, “Efektivitas pemberlakuan ASEAN- *Free Trade Area* (ACFTA) terhadap pasar industri kosmetik”. Pada jurnal ini penulis membahas tentang efektivitas terhadap pemberlakuan ASEAN- *Free Trade Area* (ACFTA) dalam mempengaruhi pasar industri kosmetik Indonesia. Di Indonesia sendiri Industri kosmetik merupakan sektor bisnis yang menghadapi tingkat persaingan yang tinggi. Dengan diberlakukannya ACFTA sehingga hambatan terhadap biaya transaksi perdagangan sudah ditiadakan, maka akan berdampak pada efisiensi ekonomi yang semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan kawasan ASEAN dan Cina memiliki daya tarik yang tinggi sebagai tujuan investasi. Karena adanya penghapusan biaya transaksi perdagangan melalui pemberlakuan perjanjian

ASEAN- *Free Trade Area* membuat efektivitas terhadap pasar industri Kosmetik di Indonesia. melalui perdagangan bebas tersebut Indonesia memiliki 760 industri kosmetik yang tersebar di berbagai wilayah. Membuka lapangan pekerjaan hingga mencapai 75 ribu orang dan 600 ribu orang yang bekerja pada bidang pemasaran (Tresia 2014).

Pada jurnal kedua yang ditulis oleh Aulia Rahman B, Baso Iwang, Amira Taqiya, yang berjudul “Analisis implementasi CAFTA terhadap komoditas tekstil di Indonesia”. Dalam jurnal ini peneliti lebih berfokus pada dampak implementasi CAFTA terhadap tekstil di Indonesia. Dalam uji hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, dengan menggunakan uji Independent sample t Test, dihasilkan hasil t hitung 0,000. Dengan hasil t hitung $< 0,05$ yang menunjukkan bahwa terdapat adanya kesenjangan yang signifikan terhadap nilai ekspor komoditas tekstil di Indonesia ke cina sebelum dan sesudahnya diimplementasikannya perjanjian CAFTA. Nilai ekspor sesudah diberlakukan CAFTA lebih besar dibandingkan nilai ekspor sebelum diberlakukannya CAFTA yakni, 139.948.015,2 USD sebelum, dan 634.938.904,7 sesudah. Sedangkan pada nilai impor dengan menggunakan uji hipotesis yang sama, nilai impor tekstil setelah diberlakukan CAFTA lebih besar dibandingkan sebelum diberlakukan CAFTA. Nilai rata-rata tersebut 634.938.904,7 USD sebelum diberlakunya CAFTA dan 3.226.832.009 sesudah diberlakunya CAFTA. Jika dilihat dari data pertumbuhan nilai tersebut, menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara pertumbuhan nilai impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor yang terjadi dalam 24 tahun terakhir (Iwang dan Taqiya 2022).

Pada jurnal ketiga yang ditulis oleh Pebriana Arimbhi dan Yusuf Hutapea

dengan judul, “Implementasi kebijakan ACFTA (ASEAN- *Free Trade Area*) di kantor pelayanan utama bea dan cukai tipe A Tanjung Priok”. Dalam jurnal tersebut penulis memaparkan bahwa entitas-entitas pendorong yang secara langsung saling berhubungan dengan ACFTA, dan entitas apa saja yang secara langsung dapat menghambat implementasi kebijakan ACFTA di KPUBC Tipe A Tanjung Priok. Dari hasil penulisannya peneliti menjelaskan, jika dilihat dari entitas pendorong yang secara bersamaan saling berhubungan dengan kebijakan ACFTA yaitu sikap pemerintah yang mendukung dalam perencanaan program-program seperti, pembiayaan komoditas dalam negeri, pameran dagang internasional, serta pembiayaan ekspor. Terdapat juga hal yang menghambat Implementasi ACFTA seperti melaksanakan kebijakan ACFTA industri harus melalui beberapa proses yang cukup panjang dan persyaratan yang rumit yang menyebabkan belum banyak industri yang secara sempurna dapat memanfaatkan fasilitas dari adanya kebijakan ACFTA (Arimbhi dan Hutapea 2022) .

Pada jurnal ke empat yang ditulis oleh Fajar Suryanto, Budi Hartono dan Ressi Dwiana, dengan judul “Implementasi kebijakan ASEAN- China *Free Trade Area* (ACFTA) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pabean belawan, Sumatera Utara”. Dalam jurnal tersebut penulis membahas tentang implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) pada KPPBC TMP Belawan yang dilihat melalui 4 indikator oleh Edward III. Jika dilihat dari sisi implementasi, sumber daya dan disposisi terkait implementasi kebijakan ACFTA dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada KPPBC TMP belawan, Sumatera Utara secara umum sudah berjalan dengan baik meskipun pada sumber daya manusia seksi penyuluhan dan

layanan informasi belum mengikuti *Rules of Origin* (ROO). Sedangkan untuk komunikasi dan struktur birokrasi terkait implementasi kebijakan ACFTA dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada KPPBC TMP Belawan belum berjalan dengan baik. Jika dilihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ASEAN- *Free Trade Area* (ACFTA) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada KPPBC TMP Belawan, yang dimanah faktor yang menjadikan komunikasi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik, sedangkan untuk faktor-faktor yang menjadikan sumber daya dan disposisi implementasi kebijakan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada KPPBC TMP Belawan Sumatera sudah berjalan dengan baik (Suryanto, Hartono, dan Dwiana 2022).

Pada jurnal ke empat yang ditulis oleh Sigit Setiawan, dengan judul “*Trade Creation dan Trade Diversion* atas Pemberlakuan ACFTA Terhadap Perdagangan Hortikultura Indonesia”. Dalam jurnal ini membahas terkait daya saing produk yang diperdagangkan (produk hortikultura) pada kerangka kerja perjanjian FTA seperti ACFTA guna memastikan bahwa integrasi ekonomi tersebut membawa dampak positif pada perdagangan Indonesia. Di mana dan Thailand mempunyai keunggulan komparatif terhadap produk sayur yang dimiliki oleh dan Thailand baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya ACFTA secara penuh. Sedangkan Indonesia tidak berdaya saing pada kedua produk tersebut yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan yang dimanah telah terjadi *Trade Creation* pada perdagangan produk hortikultura atas pembentukan ACFTA (Setiawan 2012).

Dari jurnal-jurnal yang telah dijabarkan, seluruh jurnal tersebut membahas dampak dari implementasi ACFTA terhadap suatu sektor. Beberapa diantara juga

membahas terkait sektor yang mengalami peningkatan disahkan dan di implementasikan ACFTA. Dan juga ada pula sektor yang mengalami penurunan saat disahkan dan di implementasikan ACFTA. Meski demikian, belum ada peneliti terdahulu yang membahas lebih rinci dalam menganalisis mengenai Implementasi kebijakan ACFTA di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019-2023.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Bentuk kerja sama Perdagangan Internasional yang akan menjadi sasaran topik utama dalam menjelaskan dan menganalisis mengapa Indonesia mengimplementasikan ACFTA 2019 dengan menggunakan konsep John Ravenhill dalam bukunya yang berjudul *Global Political Economy*. Pemerintah Biasanya memiliki banyak motif dalam melakukan perjanjian yang rumit seperti kemitraan regional: Sangatlah naif jika berhadap menemukan satu faktor yang dapat menjelaskan tindakan pemerintah dalam seluruh perjanjian regional. Kombinasi alasan mengapa pemerintah mengadakan perjanjian ekonomi regional mencakup faktor politik, strategi, dan ekonomi. Dalam Teori ini Bentuk kerja sama Perdagangan Internasional ini oleh John Ravenhill, mencangkup dua motivasi yakni Motivasi politik dan Motivasi ekonomi (Ravenhill 2020). Dalam teori ini Ravenhill menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama perdagangan Internasional melalui regionalisme.

A. Motivasi politik perjanjian perdagangan regional

1. kerja sama ekonomi dan pembangunan kepercayaan, Regionalisme menggunakan kerjasama ekonomi untuk mencapai politik seperti meningkatkan

hubungan antarnegara dan keamanan wilayah. Hal ini membantu membangun kepercayaan, terutama di daerah dengan sejarah konflik.

2. Regionalisme sebagai imbalan bagi mitra keamanan, Negosiasi RTA telah digunakan oleh negara-negara besar, untuk memberi penghargaan kepada mitranya. perjanjian-perjanjian ini digunakan untuk memberikan penghargaan. Perjanjian-perjanjian ini digunakan untuk memberi penghargaan atau menumpang sekutu untuk mendukung keamanan yang sudah ada.
3. Kerja sama ekonomi regional dan agenda keamanan baru, Kerja sama ekonomi regional dapat mengatasi ancaman keamanan non-tradisional seperti kerusakan lingkungan, migrasi ilegal, dan terorisme. Ini dilakukan melalui aturan khusus dalam perjanjian dan mendorong pembangunan ekonomi untuk memperbaiki kondisi yang menjadi penyebab ancaman tersebut.
4. Regionalisme sebagai alat tawar-menawar, Regionalisme digunakan oleh negara berkembang untuk meningkatkan daya tawar dengan perusahaan transnasional dan mitra dagang, mendapatkan lebih banyak bantuan dan memperkuat posisi internasional melalui integrasi ekonomi regional
5. Regionalisme sebagai mekanisme untuk mengunci reformasi, Meningkatkan kredibilitas reformasi ekonomi domestik, menarik investor asing, dan memastikan kepatuhan yang lebih ketat terhadap komitmen dibandingkan forum global. Ini mendorong reformasi ekonomi melalui komitmen regional yang lebih spesifik dan kredibel.
6. Regionalisme untuk memenuhi tuntutan timbal balik, regionalisme memungkinkan pemerintah menerima konsesi timbal balik dari mitra perdagangan, memudahkan liberalisasi perdagangan secara politis, dan

memberikan manfaat bagi mitra regional serta komunitas internasional yang lebih luas.

7. Kemudahan negosiasi dan Implementasi perjanjian ACFTA, perjanjian regional lebih mudah dinegosiasikan dan diimplementasikan dibandingkan perjanjian global karena jumlah negara yang lebih sedikit dan keragaman kepentingan yang lebih rendah.

B. Motivasi ekonomi untuk regionalisme

1. Alasan ekonomi dalam memilih regionalisme dibandingkan multilateralisme regionalisme memungkinkan perlindungan berkelanjutan terhadap sektor sektor yang tidak dapat bertahan dalam persaingan global.
2. Regionalisme memberikan peluang untuk 'integrasi yang lebih dalam', regionalisme memungkinkan kesepakatan pada isu-isu yang tidak tercapai di WTO, mendorong liberalisasi perdagangan dengan kerja sama lebih mendalam dalam investasi.
3. Alasan ekonomi untuk lebih memilih regionalisme dari pada unilateralisme atau status quo pasar yang lebih besar dan peningkatan investasi asing. Regionalisme sering lebih disukai dari pada unilateralisme karena memberikan pasar domestik yang lebih besar dan meningkatkan investasi asing. Ini memungkinkan produksi lebih efisien melalui skala ekonomi dan memperluas cakupan liberalisasi perdagangan.

ACFTA merupakan salah satu jenis organisasi perdagangan internasional yang hanya dikhususkan bagi negara-negara yang terlibat dalam organisasi tersebut. ACFTA adalah organisasi perdagangan internasional yang bertujuan

untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan berupa tarif maupun non-tarif. ACFTA sendiri merupakan organisasi yang difokuskan dalam bidang perdagangan dan investasi, dengan tujuan awal sama-sama menguntungkan bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya. Melalui Faktor politik dan Faktor ekonomi perjanjian perdagangan internasional yang digagas oleh John Ravenhill memberi landasan bagi penulis untuk menganalisis Bagaimana Implementasi perdagangan bebas ACFTA di Indonesia masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2023?

Melalui perdagangan bebas ACFTA dengan menciptakan perdagangan bebas guna mendorong aliran barang dan jasa tanpa hambatan tarif atau non-tarif bagi negara-negara yang tergabung dalam ACFTA. ACFTA yang diberlakukan pada 2010 mendapat banyak mendapatkan argumen pro dan kontra. Tetapi dengan diberlakukannya ACFTA 2010 ini lebih banyak mendapat argumen kontra. Argumen tersebut berasal dari parah buruh banyak yang merasa keberatan dengan adanya pemberlakuan ACFTA ini, termasuk juga anggota DPR RI mengatakan Indonesia harus menegosiasikan ulang ACFTA karena dianggap dapat menyebabkan banyak kelumpuhan pada masyarakat.

Walaupun ACFTA yang di berlakukan pada 2010 mendapat banyak pendapat Kontra di kalangan masyarakat, Perjanjian ACFTA ini terus berlanjut dengan Disahkannya ACFTA pada 2019 dan diimplementasikan pada tahun 2019. Melalui permasalahan di atas penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan Dua motivasi yang digagas oleh Ravenhill dalam Bukunya yang berjudul *Global Political Economy* terkuat motivasi politik untuk memasuki perjanjian perdagangan regional.

1.7 Argumen Sementara

Berdasar konsep Perjanjian Perdagangan Internasional yang digagas oleh John Ravenhill dengan mempertimbangkan dua motivasi. Tujuh motivasi politik, kerja sama ekonomi dan pembangun kepercayaan, regionalisme sebagai imbalan bagi mitra keamanan, kerja sama ekonomi regional dan agenda keamanan baru, regionalisme sebagai alat tawar-menawar, regionalisme sebagai mekanisme untuk mengunci reformasi, regionalisme untuk memenuhi tuntutan timbal balik, kemudahan negosiasi dan implementasi perjanjian. Serta tiga motivasi ekonomi, alasan ekonomi dalam memilih regionalisme dibandingkan multilateralisme, regionalisme memberikan peluang untuk integrasi yang lebih dalam, dan alasan ekonomi untuk memilih regionalisme dari pada unilateralisme. Dengan mempertimbangkan dua motivasi John Ravenhill, riset ini mencoba menjawab rumusan masalah mengenai “Bagaimana Implementasi perdagangan bebas ACFTA di Indonesia masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2023?”. Dengan fokus pada perdagangan bebas, yang relevan bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional. Dengan melihat upaya-upaya yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam penerapan perjanjian ACFTA di Indonesia. Serta bagaimana perdagangan bebas ACFTA dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia dan mencapai tujuan kerja sama perdagangan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Menciptakan kawasan perdagangan bebas dengan mengurangi bahkan menghilangkan tarif ataupun non tarif. Dengan tujuan dapat mempermudah perdagangan ekspor dan impor sebagai bagian dari

strategi ekonomi Indonesia melalui perdagangan untuk mendapatkan keuntungan bagi setiap negara yang terlibat tanpa adanya kerugian sepihak.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengangkat kasus terkait topik di atas. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam konteks ilmiah untuk menafsirkan fenomena tertentu. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dengan penekanan pada makna dan generalisasi (Metodologi penelitian kualitatif , 2018).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemerintah Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2023. Sedangkan objek penelitian ini adalah kepentingan implementasi perjanjian ACFTA di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perdagangan bebas ACFTA di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019-2023.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (studi pustaka) beberapa sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang sejalan dengan topik pembahasan, bersamaan juga dengan data pendukung lainnya yang berasal dari informasi dari internet, majalah dan surat kabar.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data langkah yang dilakukan penelitian dengan membaca seluruh data yang diarsipkan, memahami, menelaah, dan selanjutnya mencatat hasil dari pemahaman data melalui buku, jurnal, dokumen, laporan berita, dan web resmi yang berkaitan dengan implementasi terhadap ACFTA di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah itu memulai studi pustaka agar peneliti dapat menganalisis masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari studi pustaka yang dilakukan barulah peneliti menyimpulkan bagaimana sebenarnya peran dan fungsi dari implementasi terhadap ACFTA di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019-2023.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini pada pembahasan terbagi menjadi 4 (empat) bab, dengan tujuan untuk memperjelas alur pemikiran penulis. Sistematika pembahasan empat bab tersebut diuraikan sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab kedua akan menjelaskan terkait implementasi perjanjian ACFTA di Indonesia tahun 2019-2023.

Bab III: Pada bab tiga akan Mengapa Indonesia masih mengimplementasikan ACFTA pada 2023 dengan menggunakan Kerangka pemikiran John Ravenhill yang menjadi dasar Perjanjian Perdagangan Internasional.

Bab IV : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian berikutnya.

BAB 2

DINAMIKA PERKEMBANGAN ACFTA DI INDONESIA

2.1 Aktivitas Perdagangan Bebas ACFTA di Indonesia pada 2019 hingga 2023

Melonjaknya berbagai macam produk yang berada di pasar domestik saat ini tidak luput dari peran perdagangan internasional yang semakin luas, ketika berbagai peraturan yang sifatnya menghambat dan sepakat untuk dikurangi, makan di sini tingkat luas dan lalu lintas barang semakin tinggi. Pada abad 18 Adam Smith telah menyatakan bahwa keutamaan dari perdagangan antara negara adalah dengan bersedianya menghilangkan berbagai hambatan tarif atau pun non tarif. Smith mengatakan jika perdagangan bebas dapat meningkatkan efektivitas ekonomi dunia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Singkatnya perdagangan bebas merupakan pengurangan atau ditiadakan-Nya hambatan perdagangan baik yang berupa tarif (ekspor dan impor) maupun berupa non tarif (Dariah 2005). ACFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan di antara kedua belah pihak. Bagi Indonesia, ACFTA membuka peluang untuk memperluas ekspor ke pasar Tiongkok yang besar dan mendorong investasi asing dari Tiongkok ke Indonesia (Yanti dan Yusuf 2024). Dalam konteks perjanjian ACFTA, negara-negara anggota saling memberikan perlakuan istimewa di tiga sektor: barang, jasa dan Investasi dengan tujuan mempercepat aliran barang, jasa dan investasi. perlakuan istimewa ini lebih menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikan kepada negara mitra non-anggota pada umumnya (Setiawan 2012).

Perdagangan bebas ACFTA dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dengan memperluas kerja sama dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti Indonesia akan mendapatkan pemasukan tambahan dari PPN untuk produk-produk baru yang masuk, produk-produk dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia berpotensi besar menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Persaingan usaha yang muncul akibat ACFTA diharapkan dapat menciptakan persaingan harga yang kompetitif, yang menguntungkan bagi konsumen Indonesia, tentunya dengan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan daya saing seperti infrastruktur, transportasi, dan sektor makro lainnya (Julina 2022).

Berikut merupakan data perdagangan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Indonesia dan ASEAN.

Tabel 1. 10 Komoditas Utama Ekspor dan Impor Indonesia-Tiongkok 2019, Nilai Ekspor dan Impor (FOB) dalam USD

No.	Komoditas Ekspor	Nilai Ekspor	Komoditas Impor	Nilai Impor
1.	Bahan bakar mineral	6,3 miliar	Mesin dan peralatan mekanik	2,3 miliar
2.	Lemak dan minyak nabati	3,63 miliar	Mesin dan perlengkapan elektrik	1,95 miliar
3.	Besi dan baja	3,12 miliar	Besi dan baja	960,7 juta
4.	Biji, Terak, Abu Logam	2,34 miliar	Kendaraan dan bagiannya	692,7 juta
5.	Pulp dari kayu	2,02 miliar	Serelia	235,9 juta
6.	Berbagai produk kimia	1,05 miliar	Ampas atau isis industri makanan	214,5 juta

No.	Komoditas Ekspor	Nilai Ekspor	Komoditas Impor	Nilai Impor
7.	Bahan kimia organik	816,86 juta	Logam mulia, perhiasan dan permata	139 juta
8.	Ikan dan Udang	591,07 juta	Gula dan kembang gula	89,2 juta
9.	Tembaga	578,73 juta	Bahan bakar mineral	292,4 juta
10.	Kayu dan barang dari kayu	535,35 juta	Buah-buahan	172,4 juta

Sumber: BPS (Diolah CNBC Indonesia)

Bahan bakar mineral menjadi komoditas ekspor terbesar ke Tiongkok dengan nilai mencapai US\$ 6,2 miliar, yang merupakan 22,3% dari total ekspor ke negara tersebut US\$ 27,9 miliar. Komoditas terbesar berikutnya adalah lemak dan minyak/nabati dengan nilai US\$ 3,6 miliar. Meskipun mengalami peningkatan tahun lalu, perlambatan ekonomi Tiongkok akibat penyebaran virus corona perlu diantisipasi tahun ini. perlambatan tersebut dapat mengurangi konsumsi dan produksi, yang pada gilirannya dapat menurunkan permintaan terhadap barang-barang dari Indonesia.

Tabel 2. 10 Komoditas Utama Ekspor dan Impor Indonesia -Tiongkok 2020, Nilai Ekspor dan Impor (FOB) dalam USD

No.	Komoditas Ekspor	Ekspor	Komoditas Impor	Impor
1.	Ferro nickel	474 juta	Mesin dan peralatan mekanik	1,77 miliar

No.	Komoditas Ekspor	Ekspor	Komoditas Impor	Impor
2.	Minyak sawit dalam kemasan	216,40 juta	Mesin dan perlengkapan elektrik	1,48 miliar
3.	Bahan kimia, soda dan sulfat	168,57 juta	Besi dan baja	539,9 juta
4.	Bijih tembaga dan konsentratnya	148,22 juta	Plastik dan barang dari plastik	532,3 juta
5.	Baja, stainless dan barang setengah jadi	146,60 juta	Bahan kimia organik	386,3 juta
6.	Lignit	82,62 juta	Kendaraan dan bagiannya	297,2 juta
7.	Minyak sawit yang tidak dimurnikan	80,722 juta	Perangkat optik, fotografi, sinematografi, medis	257,6 juta
8.	Batu bara	71,04 juta	Sereal	238,8 juta
9.	Sarang burung yang bisa dimakan	54,94 juta	Berbagai produk kimia	216,8 juta
10.	Minyak dan produk lainnya	48,47 juta	Logam Mulia, perhiasan/permata	208,4 juta

Sumber: BPS (Diolah CNBC Indonesia)

Tiongkok tetap menjadi tujuan ekspor utama bagi Indonesia. Pada Oktober 2020, terjadi peningkatan ekspor yang signifikan sebesar USD 234,7 juta ke Tiongkok, meningkat 8,94% dibandingkan dengan bulan September. Dengan adanya peningkatan ini, total ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok mencapai USD 2,86 miliar, naik dari USD 2,62 miliar pada bulan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor Indonesia ke Tiongkok terdiri dari

ekspor migas sebesar USD 101,13 juta dan ekspor non-migas sebesar USD 2,86 miliar.

Menurut data yang berasal dari kementerian perdagangan, produk-produk unggulan dan potensial Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan nilai ekspor yang signifikan, dengan beberapa produk pencatatan peningkatan di atas 100 persen dalam kode HS dua digit. Beberapa di antaranya adalah: Bahan bakar mineral dan produk saingannya (HS 27) yang naik 137,5 persen; produk turunan nikel (HS 75) yang melonjak 14.795,9 persen; produk industri penggilingan (HS 11) yang meningkat 1.641,9 persen; produk keramik (HS 69) yang naik 129,4 persen; logam tidak mulia lainnya (HS 81) yang mengalami peningkatan 8.845,1 persen; olahan dari sayuran, buah, biji/kacang (HS 20) yang naik 133,6 persen; mutiara alam, mutiara budidaya, logam mulia (HS 71) yang meningkat 119,7 persen; produk hewani (HS 05) yang naik 193,9 persen; olahan dari daging ikan, krustasea, moluska (HS 16) yang naik 357,9 persen; serta kendaraan yang bergerak di atas rel dan bagiannya (HS 86) yang meningkatkan 2.673 persen. selain itu produk kopi (HS 0901) juga menunjukkan peningkatan sebesar 22,8 persen, dan nilai ekspor kelompok produk makanan dan minuman turut naik sebesar 80,5 persen di tahun 2021 (. Ekspor non migas terbesar bulan Agustus 2022 terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US\$904,7 juta. Nilai Impor Indonesia dari Tiongkok pada 2021 mencapai US\$ 49,91 miliar. Barang impor terbesar adalah perangkat telekomunikasi dan perangkatnya sebesar US 5,31 miliar, obat-obatan dan kesehatan US\$ 2,16 miliar, mesin dan pengelola data otomatis dan unitnya US\$ 2,02 miliar, alat pemanas dan pendingin US\$ 1,8 miliar, kelompok

mesin industri tertentu US\$ 1,14 miliar, dan barang impor lainnya US\$ 37,47 miliar (Kusnandar 2022).

Nikel masih menjadi ekspor utama Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2022 dengan nilai mencapai US\$ 3,87 miliar (Kusnandar 2023). Pada Desember 2022, Nilai Impor Indonesia ke Tiongkok mencapai US\$ 67,72 miliar. Adapun komoditas utama dalam impor tersebut yang pertama reaktor nuklir, broiler, mesin, dan peralatan mekanis US\$ 16,16 miliar. Yang kedua mesin dan peralatan listrik US\$ 14,47 miliar. Ketiga besi dan baja US\$ 3,25 miliar. Keempat plastik dan artikelnnya US\$ 2,94 miliar. Dan yang kelima bahan kimia organik US\$ 2,61 miliar (Darmawan 2024).

Tabel 3. 10 Komoditas Utama Ekspor Impor Indonesia-Tiongkok 2023, Nilai Ekspor Impor (FOB) dalam USD

No.	Komoditas	Ekspor	Komoditas	Impor
1.	Bahan bakar mineral	4.483,89 juta	Peralatan listrik	3.688,45 juta
2.	Besi dan Baja	4. 379,06 juta	Mesin mekanik	3. 256,87 juta
3.	Lemak hewani/nabati	1.460,17 juta	Besi dan baja	762,32 juta
4.	Nikel	1. 248,12 juta	Plastik dan barang plastik	646,98 juta
5.	Pulp	723,11 juta	Kimia organik	566,30 juta
6.	Produk kimia	696,78 juta	Kendaraan dan bagiannya	514,84 juta
7.	Bijih, Kerak, abu logam	454,00 juta	Bahan bakar mineral	478,95 juta

No.	Komoditas	Ekspor	Komoditas	Impor
1.	Bahan bakar mineral	4.483,89 juta	Peralatan listrik	3.688,45 juta
2.	Besi dan Baja	4.379,06 juta	Mesin mekanik	3.256,87 juta
3.	Lemak hewani/nabati	1.460,17 juta	Besi dan baja	762,32 juta
4.	Nikel	1.248,12 juta	Plastik dan barang plastik	646,98 juta
5.	Pulp	723,11 juta	Kimia organik	566,30 juta
8.	Sisa industri makanan	348,23 juta	Barang dari besi dan baja	410,03 juta
9.	Alas kaki	167,64 juta	Produk kimia	306,36 juta
10.	Kimia organik	164,95 juta	Filamen buatan	287,85 juta

Sumber: BPS (diolah PDSI Kementerian Perdagangan)

Pada periode Januari-Maret 2023, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami surplus sebesar USD 1,24 miliar, berbanding terbalik dengan defisit sebesar USD 2,82 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Struktur ekspor Indonesia ke Tiongkok didominasi oleh sektor industri, yang menyumbang 64,8% dari total ekspor Indonesia. Namun, kontribusi sektor industri ini turun dari 70,6% pada periode yang sama di tahun 2022. Selain sektor industri, sektor pertanian dan pertambangan masing-masing berkontribusi 1,9% dan 29,5% terhadap total ekspor Indonesia ke Tiongkok.

Tabel 4. Neraca Perdagangan Indonesia-Tiongkok 2019-2023, Nilai Ekspor dan Impor (FOB) dalam USD Miliar

NO		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekspor	27,961.9	31,781.8	53,765.5	65,924.1	64.938,7
2	Impor	44,930.6	39,634.7	56,227.2	67,723.7	62.880,9
3	Neraca Perdagangan	-16,968.7	-7,852.9	-2,461.7	-1,883,3	2.057,8

Sumber: BPS

Pada periode Januari - Maret 2023, ekspor Indonesia ke mencapai USD 16,58 MILIAR, meningkat sebesar 26,71 (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. sementara itu, Impor Indonesia dari mencapai USD 15,34 miliar, mengalami penurunan sebesar 3,56% (YoY) jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022. sedangkan neraca perdagangan Indonesia dengan tercatat surplus sebesar USD 1,24 miliar, berbeda dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar USD 2,28 miliar.

Tabel 5. 10 Produk Ekspor Non-migas Utama Indonesia-ASEAN Tahun 2019-2023, Nilai Ekspor (FOB) dalam USD Juta

NO	HS 6 DIGIT BTKI 2022	2019	2020	2021	2022	Jan-Ags2023
1	270119 - Coal	3.397,09	3.210,52	5.629,69	10.501,09	5.726,57
2	151190 - Vegetable Oils	1.188,99	1.847,55	3.328,20	3.373,64	1.484,01
3	870323 - Vehicles	1.417,83	573,89	638,60	1.683,03	703,67

NO	HS 6 DIGIT BTKI 2022	2019	2020	2021	2022	Jan-Ags2023
4	740311 - Copper	678,28	522,12	1.215,9 2	1.357,23	476,52
5	854370 - Electric machines and apparatus	17,53	13,74	62,34	1.070,43	524,92
6	260300 - Copper ores and concentrates	190,21	136,27	574,97	1.014,87	419,79
7	721913 - Steel, stainless	513,22	341,24	619,51	983,13	590,92
8	270112 - Coal, bituminous	1.279,65	747,44	1.141,3 8	977,40	717,89
9	870322 - Vehicles	716,42	807,22	752,36	970,98	868,71
10	382319 - Industrial monocarboxylic fatty acids	397,33	368,36	640,12	952,33	375,82

Sumber: BPS (Diolah, PDSI Kementerian Perdagangan), 2023.

Pada tabel di atas Batu Bara (HS 270119) masih menjadi produk utama ekspor Non Migas terbesar Indonesia ke ASEAN dalam empat tahun terakhir. pada tahun 2022 ter catatn menjadi peningkatan ekspor terbesar yaitu mencapai 86,53% dibanding tahun 2021 menjadi USD 10,5 Miliar. Dari sepuluh produk ekspor terbesar Indonesia ke ASEAN, sebagian besar mengalami penurunan ekspor semalam periode Januari-Agustus 2023 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. kecuali untuk produk HS 870322 (Vehicles) yang mengalami pertumbuhan sebesar 22,49% menjadi USD 868,71 Juta.

Tabel 6. 10 Produk Impor Non-migas Utama Indonesia-ASEAN Tahun 2019-2023 (Januari-Agustus), Nilai Impor (CIF) dalam USD Juta

NO	HS 6 DIGIT BTKI 2022	2019	2020	2021	2022	Jan-Ags 2023
1	170114 - Sugars	1.127,98	686,42	441,79	1.107,50	1.048,02
2	390210 - Propylene	612,51	426,39	657,17	789,23	418,99
3	710812 - Metals	384,68	390,56	431,73	669,50	160,63
4	870421 - Vehicles	293,38	103,75	247,04	560,07	398,87
5	290121 - Acyclic hydrocarbons	414,50	276,31	522,23	538,28	309,07
6	390110 - Ethylene polymers	409,53	316,12	508,88	535,09	307,38
7	854290 - Parts of electronic integrated circuits	374,67	401,64	828,08	479,90	299,20
8	854129 - Electric apparatus	156,67	155,83	38,69	471,59	124,93
9	847150 - Units of automatic data processing machine	146,13	83,83	136,75	398,94	188,49
10	390230 - Propylene	3-5,34	251,74	392,95	386,18	214,34

Sumber: BPS (Diolah, PDSI Kementerian Perdagangan),2023

Gula (HS 170114) merupakan komoditas impor non migas utama dari ASEAN dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai impor gula Indonesia dari ASEAN mencapai USD 1,1 Miliar atau sebanyak 3,37% dari total impor Indonesia dari ASEAN. Selama periode kumulatif Januari-Agustus 2023, salah satu impor yang mengalami peningkatan adalah HS 870421 (Vehicles), yang

tumbuh sebanyak 34,94% (YoY) menjadi USD 398,87 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

Tabel 7. Neraca Perdagangan ASEAN-Tiongkok 2019-2023, Nilai Ekspor dan Impor (FOB) dalam USD Miliar

NO		2019	2020	2021	2022
1	Ekspor	202.2	218.0	282.0	213.0
2	Impor	305.1	298.7	387.0	311.3

Sumber: BPS (diolah PDSI Kementerian Perdagangan)

Setelah diimplementasikan ACFTA pada tahun 2019, yakni pada tahun 2020 dan 2021, ekspor ASEAN ke Tiongkok meningkat sebesar USD 218,0 miliar dan 282,0 miliar, dengan rata-rata per tahun sekitar USD 250,0 miliar. Setelah pelaksanaan ACFTA, terjadi peningkatan rata-rata ekspor per tahun dari ASEAN ke Tiongkok sebesar 53,6%. sementara itu, pada sektor impor, setelah diimplementasikannya ACFTA pada tahun 2019 realisasi impor ASEAN dari Tiongkok mencapai USD 298,7 miliar per tahun 2020 dan kembali meningkat USD 387,0 miliar. dengan rata-rata impor per tahun sekitar USD 342,9 miliar setelah implementasi ACFTA, terjadi peningkatan rata-rata impor per tahun dari ASEAN-Tiongkok sebesar 46,9%.

Deputi Bidang Kerja sama Penanaman Modal Kementerian Investasi (BKPM) mencatat bahwa Tiongkok telah konsisten menempati posisi lima besar sebagai sumber investasi asing di Indonesia selama lima tahun terakhir (Handoyo and Usman 2024). Investasi Tiongkok di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan, dari USD 4,74 Miliar pada 2019 menjadi USD 8,22 miliar pada 2022. Dan pada 2023 investasi Tiongkok di Indonesia tercatat sebesar USD 7,4 miliar.

Kerjasama Investasi ini di bawah kerangka kerja *Belt and Road Initiative* (BRI). Potensi kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) bagi Indonesia akan difokuskan pada manufaktur teknologi baru seperti energi terbarukan, baterai, infrastruktur, teknologi informasi, pertambangan dan proyek strategis (Madrim 2023). ASEAN-*China Free Trade Area* (ACFTA) dan *Belt and Road Initiative* Berkontribusi pada peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. ACFTA memberikan fasilitas perdagangan yang kemudian diperkuat melalui proyek-proyek BRI. Perjanjian ACFTA menawarkan hukum kerangka kerja yang jelas dalam perdagangan dan investasi yang mendukung proyek-proyek BRI dengan memberikan kepastian hukum terhadap para investor dan pelaku usaha.

2.2 Upaya Peran Diplomasi Pemerintahan Indonesia di Dalam ACFTA

Diplomasi ekonomi dilakukan oleh berbagai negara di dunia untuk memperkuat kekuatan nasional, termasuk di bidang ekonomi dan perdagangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia juga menjalankan diplomasi ekonomi untuk memperkuat ekonomi domestik melalui peningkatan ekspor dan investasi (Setiawan, dkk 2020). Indonesia telah Menandatangani dan meratifikasi berbagai perjanjian internasional, termasuk dalam bidang kerjasama ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia aktif dalam perekonomian global dan membutuhkan praktik serta strategi diplomasi yang lebih kompleks (Killian 2012). Dalam merumuskan arah diplomasi ekonomi Indonesia terkait negosiasi perdagangan regional, perlu dilakukan analisis tentang

keuntungan dan kerugian partisipasi Indonesia, seperti pertimbangan terhadap keuntungan dan kerugian ekonomi perlu diimbangi dengan pertimbangan terkait dampak serta posisi Indonesia dalam hubungan dengan negara lain (Karin dan Puspaningrum 2014). Terbentuknya ACFTA dari awal pada 2002 bagi Indonesia dan diimplementasikannya ACFTA 2019 di Indonesia, tentunya perjanjian ACFTA melalui beberapa perubahan perjanjian sampai titik dimana ACFTA ini di implementasikan di Indonesia. Berikut merupakan perubahan perjanjian-perjanjian ACFTA yang diratifikasi Indonesia:

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 tahun 2008 merupakan persetujuan *Agreement On Trade In Service Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* . Peraturan ini berisi pengesahan terhadap perdagangan jasa yang diliberalisasi pada bidang jasa antara negara-negara anggota ASEAN dan . terdapat 3 poin penting dalam peraturan ini. Pertama, terdapat pengesahan dalam kerja sama ekonomi yang melingkup perdagangan jasa antara negara-negara ASEAN dan . Guna untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama perdagangan antara kedua belah pihak. Kedua, pengurangan hambatan dimana dalam peraturan ini memfasilitasi pengurangan sampai penghapusan hambatan perdagangan jasa antar negara-negara anggota ASEAN dan . Ketiga, pengesahan peraturan yang dimana bagian dari pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation antara ASEAN* dan dimana peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti kerja sama ekonomi termasuk juga perdagangan jasa.

2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 tahun 2010, Peraturan Presiden No 13 tahun 2013, Peraturan Presiden No 57 tahun 2015, berkaitan dengan pengesahan *Agreement On Investment Of The Framework On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* .
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2013 tentang pengesahan *Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Service Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* .
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2015 Tentang *Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations and The People's Republic Of China* .
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (RTT).
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011 tentang Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (RTT).
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu

antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (RTT).

Indonesia sempat menolak menandatangani Protocol Peningkatan ACFTA 2015, tetapi sikap Indonesia yang menolak meratifikasi Protokol untuk mengubah ACFTA (2015) berakhir pada bulan November 2018, Presiden Joko Widodo akhirnya meratifikasi “Protokol untuk Mengubah Kerangka Kerja Kesepakatan tentang kerja sama Ekonomi Komprehensif dan beberapa Kesepakatan di bawahnya antara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok(2015), (Julina 2022). Pada tahun 2015 dimana bertepatan dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, ACFTA kembali ditandatangani pada tanggal 12 November 2017 melalui *Upgrading Protocol* ACFTA. ASEAN dan Tiongkok menandatangani ulang *Upgrading Protocol* untuk menyempurnakan perjanjian kerangka kerja awal untuk kawasan perdagangan bebas ACFTA (Julina 2022).

Peraturan ACFTA yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden, terdapat juga peraturan kementerian yang mendukung implementasi perdagangan bebas negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.010/2022, tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (*ASEAN- Free Trade Area*). Peraturan ini

merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN- Free Trade Area peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menetapkan tarif bea masuk terhadap barang impor dari negara ASEAN dengan Republik rakyat Tiongkok sesuai dengan perjanjian ACFTA. Menetapkan tarif bea masuk pada barang impor dari Republik Rakyat Tiongkok sebagai penerapan asas timbal balik dalam persetujuan ACFTA. Barang impor yang dimaksud merupakan barang berdasarkan Peraturan Menteri terkait sistem klasifikasi barang dan tarif bea masuk atas barang impor. jika tarif bea masuk lebih rendah dari tarif ACFTA maka tarif yang berlaku merupakan tarif bea masuk umum (KEMENKEU).

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.04/2020, tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional dan peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam menggunakan atau memanfaatkan skema perjanjian ACFTA (ASEAN

Free Trade Area) untuk mendapatkan manfaat tarif preferensi wajib menaati dan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan di atas (Krismawati, Sucuati, Dkk, 2021). Ketentuan harus sesuai dengan *Rules Of Origin* (ROO) dimana meliputi, Tarif Preferensi, Kriteria Asal Barang (*Origin Certai*), Kriteria Pengiriman (*Consignment Criteria*), Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisions*). Untuk melakukan Pengenaan Tarif Preferensi, perlu melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap SKA form E yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berada di kantor Pabean dengan melakukan *Retroactive Check* dan *Verification Visit* untuk melihat keabsahan dan kebenaran terhadap SKA *form E* yang diragukan (KEMENKEU 2022).

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019, tentang Pengesahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia. Untuk mendapatkan Tarif Preferensi ACFTA pengekspor harus menggunakan SKA Form e yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit SKA yang merupakan pegawai tetap IPSKA. Untuk mendapatkan SKA form E harus sesuai dengan perjanjian ACFTA seperti, *Back-to-Back Certificate of Origin* atau *Movement Certificate* yang merupakan SKA yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA dari Negara anggota pengekspor pertama dan *Third Country Invoicing/ Third Invoicing* adalah penerbit Invoice oleh perusahaan di negara ketiga atau negara yang sama dengan tempat SKA diterbitkan (KEMENDAG).

BAB 3

ANALISIS MOTIF INDONESIA MENGIMPLEMENTASIKAN ACFTA SAMPAI SEKARANG

3.1. Motivasi Politik Perdagangan Internasional

3.1.1. Faktor Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Kepercayaan

Menurut John Ravenhill dalam faktor kerja sama ekonomi dan Pembangunan Kepercayaan, Regionalisme sering kali melibatkan penggunaan cara-cara ekonomi untuk mencapai tujuan politik melalui peningkatan hubungan antar negara atau peningkatan keamanan di suatu wilayah. Dalam hubungan internasional yang memiliki sejarah konflik atau tidak ada tradisi kemitraan, kerja sama bidang ekonomi dapat menjadi elemen inti dalam proses membangun kepercayaan (Ravenhill 2020). Berakhirnya Perang Dingin menjadi momen penting yang mendorong perubahan perspektif keamanan serta pola kerja sama keamanan antara Tiongkok dan ASEAN (Hanggraini nd). Pasca perang dingin dengan Tiongkok bertekad untuk meningkatkan kerja sama politik dengan ASEAN di Tingkat multilateral, dan penekanan pada hubungan bilateral yang erat (Bavaria). ASEAN-*China Free Trade Area* (ACFTA) merupakan salah satu bentuk kerja sama multilateral yang dibentuk oleh ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dan Tiongkok (Pratiwi nd). Dalam memperkuat hubungan perdagangan dengan Tiongkok, ASEAN dan Indonesia menjadi bagian dari Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA.

Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok sejak tahun 1950, kerja sama ekonomi antara kedua negara terus berkembang terutama

setelah implementasi kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ASEAN-*China Free Trade Area*). Indonesia meratifikasi ACFTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 pada tanggal 15 Juni 2004, dan mengalami *upgrading* pertama yang diimplementasikan secara penuh pada tahun 2019 (KEMENKEU 2023).

Selama masa Kepresidenan Joko Widodo, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok berkembang pesat. Presiden Joko Widodo telah menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap Tiongkok sejak awal masa Jabatannya (Andika 2017). Dari mulai ASEAN-*China Free Trade Area* ini di implementasikan di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023 yang bertepatan pada masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo, Indonesia terus mengembangkan kerja sama. Melalui perjanjian ACFTA pengembangan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok terus dilakukan melalui kerja sama bilateral dan penandatanganan MoU. Selama tahun 2019-2023 Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani sekitar 47 *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam bidang ekonomi seperti, peningkatan perdagangan, investasi dalam peningkatan infrastruktur. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan, Investasi Asing, dan Infrastruktur. Melalui penandatanganan MoU tersebut total realisasi investasi sepanjang tahun 2019-2023 kurang lebih sebesar 23,76 miliar. Sedangkan peningkatan perdagangan antara Indonesia - Tiongkok meningkat signifikan dari tahun 2019-2023, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 8. Data Perdagangan Ekspor Indonesia-Tiongkok 2019-2023, Nilai Ekspor dalam Miliar US\$

NO	Tahun	Total Ekspor
1	2019	27.961,9
2	2020	31.781,8
3	2021	53.781,9
4	2022	65.839,3
5	2023	64.938,7

Sumber: BPS (Diolah)

Melihat dari peningkatan perdagangan dan investasi yang signifikan setelah ACFTA di implementasikan penuh pada tahun 2019. Menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok mencerminkan pentingnya peran ekonomi dalam membangun kepercayaan antara negara, sebagai mana yang dijelaskan oleh Ravenhill. Dalam konteks hubungan bilateral kerja sama ekonomi menjadi cara strategis untuk meningkatkan hubungan politik dan menciptakan stabilitas di wilayah. Setelah ACFTA di implementasikan penuh pada tahun 2019-2023, Indonesia dan Tiongkok memiliki peningkatan yang signifikan dalam volume perdagangan, investasi dan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Hal ini menunjukkan bagaimana integrasi ekonomi melalui pendekatan regionalisme dapat meningkatkan hubungan yang lebih erat dan saling menguntungkan sekaligus meningkatkan Stabilitas wilayah. Melalui landasan ini Indonesia dan Tiongkok memiliki peluang terus-menerus dalam mengembangkan kerja sama yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung tujuan politik dan keamanan di Asia Tenggara.

3.1.2. Faktor Regionalisme Sebagai Imbalan Bagi Mitra Keamanan

Regionalisme digunakan oleh negara-negara besar, untuk memperkuat kemitraan keamanan strategis melalui perjanjian perdagangan, memberikan penghargaan kepada sekutu dan mendukung pengaturan keamanan yang ada. Sejak ACFTA diimplementasikan secara penuh tahun 2019 di Indonesia, Indonesia mulai memperluas kerjasama dengan Tiongkok. ACFTA memfasilitasi perdagangan dengan mengurangi hambatan tarif dan non tarif. Peningkatan kerjasama dapat berupa peningkatan ekspor dan kerjasama investasi. Dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Direktur Eksekutif Komite Administrasi Kawasan Perdagangan Bebas Terpadu Guangxi Pingxiang, Wang Ganghong, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok terus berkomitmen meningkatkan kerja sama perdagangan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas ekspor produk unggulan Indonesia ke pasar Tiongkok. Selain itu, pertemuan tersebut juga menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendorong peningkatan perdagangan antar kedua negara (KEMENDAG 2019). Hal ini sebagai awal kerja sama dalam peningkatan perdagangan setelah di implementasikan ACFTA pada Agustus 2019.

Pengurangan tarif yang diberikan oleh perjanjian ACFTA membuat Tiongkok masih menjadi mitra dagang utama Indonesia pada tahun 2023. Total Perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dan Indonesia pada tahun 2023 mencapai USD 127,8 miliar, dengan total ekspor 64.938 miliar dan total Impor 62.880 miliar (BPS 2024). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sejumlah komoditas utama yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke Tiongkok sepanjang tahun 2023, di posisi teratas Ferro-nikel menjadi komoditas utama dengan nilai US\$ 14,95 miliar, angka ini mencangkup 23,02% dari nilai total ekspor Indonesia ke

Tiongkok. Selain Fero-nikel, lignit atau Batubara coklat menjadi komoditas unggul lainnya, menyumbang 12,03% dari total ekspor. Berikutnya, ada batu bara dengan kontribusi 5,92% fraksi cair minyak sawit sebesar 4,70% dan nikel oxide sinters sebesar 4,10% (Nugroho, 2024).

Meningkatnya ekspor melalui perjanjian ACFTA menunjukkan bahwa perjanjian ini meningkatkan ketergantungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok yang mendorong stabilitas hubungan politik. Hubungan ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Tiongkok melalui perjanjian ACFTA menjadikan kerjasama tersebut lebih kuat dalam keamanan kawasan. Ketergantungan ekonomi yang cukup erat antara kedua negara dapat mengurangi kemungkinan konflik dan menciptakan ekosistem yang mendukung stabilitas politik dan keamanan. Dalam perjanjian ACFTA, Indonesia tidak menerima penghargaan formal secara langsung, tetapi memperoleh manfaat strategis yang bisa dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusinya dalam kawasan.

3.1.3. Faktor Kerja Sama Ekonomi Regional dan Agenda Keamanan Baru

Faktor ketiga merupakan kerja sama ekonomi regional dan agenda keamanan baru dimana kerja sama regional secara tidak langsung dengan mendorong pembangunan ekonomi dan dengan demikian memperbaiki kondisi yang dianggap pendorong ancaman keamanan non-tradisional (Ravenhill 2020). Indonesia mendapat perhatian dunia karena menjadi salah satu negara dengan tingkat emisi CO₂ tertinggi. Setiap tahunnya, Indonesia berkontribusi pada emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO₂), peningkatan emisi gas rumah

kaca, terutama CO₂, berasal dari berbagai sektor, termasuk sub sektor energi kelistrikan, pertanian, dan transportasi. di antara sektor-sektor tersebut, sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar di dunia (Fitri 2024). Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi emisi CO₂ adalah melalui pengembangan energi terbarukan. Langkah ini bertujuan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis Batubara, dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, tetapi di satu sisi sumber energi listrik dari energi terbarukan di Indonesia masih minim.

Penggunaan energi terbarukan yang meliputi bio energi, tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, dan panas bumi, terus mengalami peningkatan di wilayah global. salah satu negara yang aktif menerapkan energi terbarukan adalah Tiongkok. Tiongkok menjadi pemimpin dunia dalam produksi dan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya di sektor tenaga surya dan tenaga angin. Tiongkok sebagai mitra kerja sama Indonesia dalam kerja sama ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA)). Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN – Republik Rakyat Tiongkok (RTT) yang berlangsung di ruang Cendrawasih 3, Jakarta tahun 2023, membahas berbagai kesepakatan kerjasama di berbagai sektor. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah *Joint Initiative on Advancing the China-ASEAN Science Cooperation*, yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam transfer teknologi, termasuk teknologi energi bersih (Sekretariat Kabinet RI 2023)

Melalui kerja sama ACFTA mendorong kerja sama energi terbarukan antara Indonesia dan Tiongkok sekaligus memperkuat hubungan ekonomi. Dalam mengembangkan energi terbarukan di Indonesia, Indonesia berencana meminta

dukungan Tiongkok dalam pengembangan proyek energi terbarukan dan Infrastruktur saat presiden Joko Widodo menghadiri *Forum Belt and Road* di Beijing (Komalasari 2023). Dalam pertemuan ini, kedua negara akan mengeksplorasi peluang kemitraan yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Pada pertemuan kerja antara Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2023, Presiden RI turut menyaksikan kesepakatan antara PT PLN dan dua perusahaan besar energi bersih asal Tiongkok dalam rangka pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Kesepakatan tersebut terjadi dalam forum Indonesia dan China Business Forum (ICBF) di Beijing, Tiongkok.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia melalui PLN menandatangani tujuh *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan beberapa institusi besar, seperti *The Export-Import Bank of China, Sinosure, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, State Development & Investment Corp. Ltd, Huawei Tech Investment* , dan *China Energy International Group*. Total nilai kerja sama yang disepakati mencapai lebih dari 54 miliar USD, mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam mendukung pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur di Indonesia (Portal Jabarprovgoid 2023).

Melalui Perjanjian ACFTA yang diimplementasikan penuh pada 2019 di Indonesia , berperan penting dalam menciptakan peluang dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok, dalam hal ini khususnya dalam mengembangkan Energi terbarukan di Indonesia. Adanya kerja sama energi terbarukan antara Indonesia dan Tiongkok tidak hanya memperkuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, tetapi juga berdampak pada strategi untuk

menghadapi ancaman keamanan non-tradisional dalam hal ini kerusakan lingkungan.

3.1.4. Faktor Regionalisme Sebagai Alat Tawar Menawar

Faktor keempat merupakan faktor regionalisme sebagai alat tawar menawar, banyaknya perjanjian ekonomi regional dibuat oleh negara-negara berkembang yang dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan daya tawar mereka dengan mitra dagang (Ravenhill 2020). Indonesia sedang dalam upaya dalam melakukan perubahan besar-besaran dalam sektor energi. Hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan akan energi domestik yang mengalami peningkatan (Sinaga 2024). Sampai saat ini, batu bara masih menjadi penopang utama dalam bauran energi di Indonesia, terutama untuk kebutuhan listrik domestik yang perlu dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan listrik domestik, sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih mengandalkan batu bara sebagai bahan bakar utamanya (Sinaga 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya dari energi baru dan terbarukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tiongkok merupakan salah satu pemasok panel surya dan peralatan listrik terbesar di dunia. Tiongkok melihat Indonesia sebagai salah satu pasar potensial dalam sektor kelistrikan. Kepentingan strategis yang dimiliki oleh Tiongkok dalam memasok Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ke Indonesia. Tiongkok melihat pemasokan PLTS ke Indonesia sebagai salah satu alat tawar yang menjanjikan untuk menjalin hubungan baik secara ekonomi maupun politik.

Indonesia melihat Adanya Kolaborasi Investasi Tiongkok dalam energi terbarukan Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa perusahaan asal Tiongkok akan menjadi salah satu calon

investor yang tertarik dalam membangun pabrik panel surya di Indonesia. Produsen modul surya fotovoltaik, utama dari Tiongkok, LONGi, bekerja sama dengan Utomo SolaRUV, distributor resmi panel surya LONGi dan pelopor panel surya berlabel SNI Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi energi surya di Indonesia melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, guna mendukung peningkatan energi terbarukan di Indonesia dan mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 (Handayani 2022). Partisipasi Indonesia dalam perjanjian ACFTA menunjukkan kepada investor global dimanah Indonesia berkomitmen dalam menjaga perekonomian. Pentingnya komitmen ini bagi Indonesia untuk menarik Investasi asing (FDI) di berbagai sektor seperti infrastruktur, energi terbarukan, manufaktur dan keterlibatan berkelanjutan dalam perjanjian ACFTA menunjukkan kepada investor global bahwa negara Indonesia berkomitmen dalam menjaga perekonomian.

Dalam hal ini, Tiongkok memanfaatkan Faktor regionalisme dalam rangka ACFTA sebagai alat tawar menawar untuk meluaskan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, terlebih pada Indonesia. Dalam upaya mencapai target energi terbarukan, Tiongkok memberikan solusi energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan kepada Indonesia. Hal tersebut direspons secara positif dengan Indonesia. PT PLN juga melakukan kesepakatan bisnis untuk pengembangan Energi Baru terbarukan di Indonesia. PT PLN bersama dengan perusahaan *China Communications Construction Dredging Co., Ltd (CCCC)* sedang mempercepat pembangunan pembangkit EBT yang salah satunya yakni Pembangkit Listrik

tenaga Surya (PT PLN 2023). Adanya kerja sama yang terjalin diharapkan dapat mempercepat proses transisi energi di Indonesia (PT PLN 2023).

3.1.5. Regionalisme Sebagai Mekanisme Untuk Mengunci Reformasi

Faktor kelima merupakan regionalisme sebagai mekanisme untuk mengunci reformasi, meningkatkan kredibilitas reformasi ekonomi dalam negeri dan dengan demikian meningkatkan daya tarik perekonomian bagi calon investor asing (Ravenhill 2020). Dalam sebuah kerja sama dalam sektor ekonomi, hambatan-hambatan yang berdampak pada inefisiensi perekonomian harus dipangkas. Hal penting yang penting untuk dilakukan salah satunya yakni perlunya diadakan reformasi ekonomi sebagai pendorong kinerja untuk mencapai potensi maksimal (Aswicahyono dan Christian 2017, 1). Pelaksanaan reformasi ekonomi dalam sebuah negara melibatkan beberapa pihak dan kepentingan, pelaksanaannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yakni faktor ekonomi dan politik (Aswicahyono dan Christian 2017, 1).

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, arus investasi asing langsung (FDI) sangat penting dalam proses pembangunan. Dengan modal yang memadai, pembangunan negara diharapkan dapat berjalan lancar, yang pada akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan investasi asing (FDI) (Astatiani 2023). *ASEAN-China Free Trade Area* mencakup upaya untuk memudahkan investasi antara kedua pihak. Aturan ini memiliki potensi besar untuk memperoleh, menarik, dan mengoptimalkan investasi asing ke Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan salah satu tujuan utama dalam kerangka tersebut. ini menunjukkan bahwa *ASEAN-China Free Trade Area* telah membuka

peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan investasi asing dari kedua wilayah (Khalidun 2022).

Salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia dan Tiongkok merupakan kereta cepat. Hal ini menjadi salah satu bukti kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok dalam reformasi ekonomi, khususnya di bidang infrastruktur strategis. Indonesia dan Tiongkok sepakat membangun jalur kereta cepat yang menghubungkan Jakarta, ibu kota Indonesia, dengan Bandung. Proyek ini bertujuan mempercepat perjalanan antara kedua kota utama di Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar kedua negara. Dengan dukungan investasi besar dari pemerintah Tiongkok. Proyek ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas, menciptakan peluang ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan pengembangan sektor pariwisata di wilayah sekitarnya (Balmon Semarang 2023). Proyek ini memanfaatkan inisiatif tersebut untuk mempromosikan industri teknologi tinggi Tiongkok dan standar teknologi internasional (Wijaya 2020). Total Biaya Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai US\$ 7,2 miliar (sekitar Rp108 triliun), dengan tambahan dana sebesar US\$ 1,2 miliar (Yanwardhana 2023). dengan tambahan dana sebesar US\$ Indonesia menerima pendanaan sekitar 75 persen dari total biaya proyek dengan jumlah Rp 70,5 triliun, melalui pinjaman dari *China Development Bank* (CBD) (Mahardika 2023). Selama fase konstruksi, diharapkan menciptakan sekitar 40.000 pekerja setiap tahun, yang akan memberikan dampak ekonomi positif. selain itu, proyek ini akan memacu pertumbuhan di berbagai sektor seperti peleburan, manufaktur, infrastruktur, pembangkit listrik, elektronik, jasa dan logistik. Aktivitas dan pembangunan di sekitar stasiun juga akan membuka peluang baru bagi industri properti (Saputra 2023).

Keterlibatan regional dalam ACFTA meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia dan Tiongkok. Kawasan ACFTA memiliki keamanan yang stabil berkat stabilitas ekonomi. Karena kepentingan ekonomi bersama Indonesia dan Tiongkok lebih cenderung menjalin hubungan damai, dengan meningkatkan hubungan ekonomi demi menjalin hubungan damai dan mengurangi kemungkinan konflik yang dapat mengganggu kepentingan ekonomi bersama seperti perdagangan dan investasi. Partisipasi Indonesia dalam perjanjian ACFTA menunjukkan kepada investor global dimanah Indonesia berkomitmen dalam menjaga perekonomian. Pentingnya komitmen ini bagi Indonesia untuk menarik Investasi asing (FDI) di berbagai sektor seperti infrastruktur, manufaktur dan keterlibatan berkelanjutan dalam perjanjian ACFTA menunjukkan kepada investor global bahwa negara Indonesia berkomitmen dalam menjaga perekonomian.

Reformasi ekonomi yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk mendorong reformasi infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan di Indonesia. Adanya keterlibatan berkelanjutan dalam perjanjian ACFTA tidak hanya membuka peluang ekonomi melalui kerja sama perdagangan, tetapi juga dapat meningkatkan hubungan strategis yang mendalam antara dua negara, Indonesia dengan Tiongkok. Dalam hal ini, reformasi yang ingin dicapai yakni modernisasi transportasi dan transfer teknologi.

3.1.6. Regionalisme Untuk Memenuhi Tuntutan Timbal Balik

Faktor keenam merupakan regionalisme untuk memenuhi tuntutan timbal balik, Memastikan bahwa mereka menerima konsesi (timbal balik) dari mitranya sebagai imbalan atas apa yang telah mereka tawarkan (Ravenhill 2020). Melihat

pentingnya peran Tiongkok dalam ekonomi global khususnya di kawasan Asia, ASEAN termasuk Indonesia didalamnya merasa perlu menjadi mitra strategis dalam kerja sama ekonomi. Hubungan kerja sama antar negara perlu didasari prinsip timbal balik, di mana setiap negara dapat memberikan perlakuan setara dengan yang diterimanya dari negara lain. Prinsip ini mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam kerja sama, karena pada dasarnya tujuan hubungan tersebut adalah mencapai keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat. ACFTA merupakan perjanjian kerja sama ekonomi regional antara ASEAN dan Tiongkok yang mencakup perdagangan bebas.

Dengan penerapan ACFTA, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang menguntungkan melalui pengurangan dan penghapusan tarif serta penghapusan hambatan non-tarif di Tiongkok. Nota Kesepahaman kerjasama dagang dan kontrak dagang produk pertanian dan perikanan antara pelaku usaha antara Indonesia dengan Tiongkok telah ditandatangani secara hibrid di kantor Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan RI 2022). Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk realisasi dari tindak lanjut pertemuan bilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok. Pada waktu yang bersamaan, dilakukan penandatanganan 16 kontrak pembelian untuk 2,5 juta ton produk CPO (Crude Palm Oil) beserta produk turunannya yang berasal dari Indonesia

Salah satu ekspor Utama non migas Indonesia terhadap Tiongkok merupakan ekspor minyak kelapa sawit. Tiongkok adalah salah satu pasar utama ekspor minyak kelapa sawit bagi Indonesia. Perdagangan kelapa sawit antar kedua negara ini terus berkembang sejak diberlakukannya ACFTA. Kelapa Sawit adalah

salah satu komoditas utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, total ekspor kelapa sawit Indonesia ke Tiongkok mencapai 6,35 juta ton, angka ini menjadikan Tiongkok sebagai negara tujuan utama ekspor sawit terbesar di Indonesia, mengalahkan India yang hanya mengekspor 5,54 juta ton (Binekasri 2023). Pada tahun 2023 permintaan minyak kelapa sawit terhadap Tiongkok meningkat sebesar 7,7 ton (Usman 2024). Dengan ditetapkannya RPJM 2020-2024, pemerintah Indonesia memastikan bahwa pengembangan industri kelapa sawit akan selalu memperhatikan dan menjaga aspek lingkungan dan sosialnya. Langkah ini memiliki tujuan sebagai upaya proteksi untuk melindungi keberlanjutan lingkungan sekaligus memastikan akseptabilitas produk kelapa sawit di pasar dunia.

ACFTA memberikan dampak timbal balik bagi Indonesia, dengan adanya keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia melalui ekspor ke Tiongkok. Tiongkok sebagai mitra utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, menunjukkan bahwa perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mendapatkan manfaat ekonomi yang spesifik. Adanya penandatanganan Nota Kesepahaman turut meningkatkan kepercayaan kedua negara. Landasan hukum dan kesepahaman bersama yang memperkuat kepercayaan dalam perdagangan sektor perkebunan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pengembangan sektor pertanian sawit tidak hanya memberi keuntungan secara ekonomi, tetapi juga dapat menjaga keberlanjutan lingkungan serta menguatkan posisi petani dalam negeri. Hal ini menjadi dasar pemerintah untuk mendukung keberlanjutan ACFTA.

3.1.7. Kemudahan Negosiasi dan Implementasi Perjanjian ACFTA

Semakin besar jumlah negara bagian, semakin besar kemungkinan negara-negara tersebut mempunyai keberagaman kepentingan yang lebih besar sehingga akan mempersulit negosiasi. Perjanjian regional dengan jumlah mitra yang terbatas mungkin lebih mudah untuk dinegosiasikan dan diimplementasikan dibandingkan perjanjian di tingkat global (Ravenhill 2020). Kesepakatan ACFTA terdiri dari 10 negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Brunei, dan, Myanmar) dan Tiongkok. Perjanjian ini merupakan perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan untuk mengurangi bahkan menghapuskan hambatan perdagangan dan peningkatan akses pasar jasa, regulasi investasi yang lebih baik, serta pengembangan kerja sama ekonomi dilakukan untuk memperkuat hubungan ekonomi antar negara-negara ASEAN dan Tiongkok dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua wilayah tersebut (Center, 2019). Negara-negara yang tergabung dalam ACFTA memperoleh manfaat dari penghapusan tarif sebesar 94,6% untuk seluruh jalur ekspor dari Indonesia ke Tiongkok, selain itu perjanjian ini juga memberikan perlindungan bagi investor dan investasi di kawasan ASEAN dan Tiongkok dengan menciptakan lingkungan yang lebih transparan, mendukung, dan aman bagi para investor (KEMENDAG 2019).

Dalam pelaksanaannya ACFTA telah mengadopsi tiga prinsip perdagangan bebas dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya mengandung pada *Principles of the Trading System* yang telah diatur oleh *World Trade Organization* (WTO). Pertama, *Most Favourite Nation* (MFN) dimanah semua anggota ACFTA mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, jika suatu negara mendapatkan penurunan tarif maka berlaku bagi anggota yang lain. kedua, *National Treatment*

pada barang impor dan barang loka sama di pasar domestik, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap produk impor atau lokal, menciptakan persaingan yang setara. Ketiga, *Transparency* setiap negara harus terbuka dalam kebijakan perdagangan bebas. melalui inisiatif seperti *One Step Center*, ASEAN dan Tiongkok memfasilitasi investasi dan perizinan bisnis, sehingga investor memahami regulasi dalam skema ACFTA (Apriliantini, Hanafi, and Mahendra Juni).

ACFTA yang diimplementasikan sampai sekarang, sudah mencapai tahap perundingan paket ketiga (Oktober 2015), tiga tahap pelaksanaan perdagangan ACFTA, diantara-Nya (Aprilianti, Hanafi, Mahendra, 2023):

1. *Early Harvest Program (EHP)*, Merupakan langkah untuk mempercepat pelaksanaan ACFTA, di mana tarif *Most Favored Nation (MFN)* dihapuskan untuk beberapa jenis komoditas tertentu. EHP dibentuk pada tahun 2003 oleh *Technical Committee on Tariff and Related Matters (TC-TRM)* dan mencakup penghapusan bea masuk untuk komoditas seperti daging, ikan, produk susu, hewan ternak lainnya, tanaman hidup, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan.
2. *Normal Track*, merupakan kebijakan penurunan tarif bea masuk antara ASEAN dan Tiongkok yang mulai diberlakukan sejak 1 juli 2005. tarif ini dikurangi secara bertahap hingga mencapai 0% pada 2010, dengan pengecualian untuk beberapa pos tarif tertentu yang bisa mencapai tarif 0% pada 2012. Saat ini, tim tarif sedang menyusun program Normal Track, yang mencakup lebih dari 9.000 pos tarif.
3. *Sensitive Track, Program Sensitive Track* (yang terdiri dari *Normal Sensitive* dan *Highly Sensitive*) merupakan skema penurunan tarif bea

masuk antara ASEAN dan Tiongkok yang dilakukan lebih lambat dibandingkan *Normal Track*. *Sensitive Track* dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List*. Berdasarkan kesepakatan, Produk dalam kategori *Sensitive List* akan memiliki tarif maksimal 20% pada tahun 2012 dan diturunkan secara bertahap hingga 5% pada 2018. Sementara itu, Tarif produk dalam kategori *Highly Sensitive* tidak boleh melebihi 50% pada 1 Januari 2015. Program ini dikembangkan bersama *Normal Track* dan dirangkum dalam satu paket sebagai bagian dari implementasi *Agreement on Trade in Goods* di bawah ASEAN-China FTA, yang ditandatangani pada November 2004 di Vientiane, Laos.

Dihapuskan atau diturunkannya tarif secara bertahap untuk sebagian besar produk melalui pengurangan biaya tambahan pada barang impor dan ekspor antara negara anggota, yang dimanah hal ini dapat memudahkan sebuah perusahaan untuk menerapkan perdagangan lintas negara dengan biaya yang lebih rendah. Di Dalam ACFTA juga terdapat *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China*, Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian sengketa secara cepat, efektif, dan saling menguntungkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi antara ASEAN dan Tiongkok (ACFTA, n.d.)

Sebagai bagian dari upaya untuk mendorong perdagangan bebas antara negara-negara anggotanya, ACFTA menekankan pengurangan secara bertahap.

Negara-negara anggota ACFTA setuju untuk menurunkan tarif mereka secara bertahap dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk domestik dan membuka pasar yang lebih terbuka untuk produk dari negara mitra. Selain itu Mekanisme penyelesaian sengketa ACFTA memainkan peran penting dalam menjamin bahwa perdagangan antar negara anggota dapat berjalan dengan lancar dan bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa perdagangan untuk menyelesaikan masalah secara damai, berdasarkan aturan yang telah disepakati.

ACFTA sebagai perjanjian regional memberikan kerangka kerja yang jelas terhadap anggotanya. Kerangka kerja yang jelas dapat menjadikan perdagangan dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang ada. Proses pengurangan tarif dilakukan secara bertahap dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa, dapat memudahkan Indonesia, negara anggota ASEAN lainnya dan Tiongkok dalam mengelola perdagangan satu sama lain. Dalam Perjanjian perdagangan, adanya kemudahan pada implementasi sangatlah penting dalam meningkatkan perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan kendala-kendala lainnya yang dapat menghambat kegiatan pada perjanjian perdagangan. Kemudahan negosiasi Implementasi ACFTA didukung oleh adanya kerangka kerja yang jelas dan prinsip perdagangan bebas yang seragam, serta adanya pendekatan secara bertahap dalam pengurangan tarif. Adanya struktur yang terorganisir dapat membantu mengatasi hambatan dalam keberagaman kepentingan dan dapat memberikan kepastian bahwa suatu kesepakatan dapat diimplementasikan secara efektif. Mekanisme *One Step Center* turut serta memberi kemudahan dalam

pelaksanaan negosiasi dalam sebuah perjanjian. Inisiatif-inisiatif seperti ini yang memudahkan ACFTA untuk diakses dan diimplementasikan oleh seluruh pihak.

3.2. Motivasi Ekonomi Regionalisme

3.2.1. Alasan ekonomi dalam memilih regionalisme dibandingkan multilateralisme regionalisme memungkinkan perlindungan berkelanjutan terhadap sektor-sektor yang tidak dapat bertahan dalam persaingan global.

CAEXPO (Chian-ASEAN Expo) merupakan pameran internasional tahunan yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan, investasi, dan kerja sama antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN. CAEXPO menjadi salah satu platform penting untuk memperkuat hubungan ekonomi dan diplomasi antara kedua pihak, dengan menampilkan berbagai produk, layanan, serta peluang kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan barang, jasa, investasi, pariwisata, dan teknologi. CAEXPO sebagai bentuk dukungan dalam implementasi *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) dengan memperluas hubungan bisnis dan pengunjung dari seluruh dunia. Indonesia sendiri rutin turut akan dalam partisipasi pameran ini pada setiap tahunnya dengan memamerkan produk-produk hasil Indonesia.

Indonesia aktif berpartisipasi dalam China-ASEAN Expo (CAEXPO) ke-17 hingga ke-20 dengan menampilkan dua paviliun yakni paviliun komoditas dan paviliun nasional.

1. CAEXPO ke-17 pada 27-30 November 2020, Indonesia menampilkan dua paviliun komoditas dengan 21 stan untuk produk zona furnitur, makanan, minuman, *fesyen* dan *Lifestyle* dan paviliun nasional untuk promosi budaya, perdagangan, investasi dan pariwisata.

2. CAEXPO ke-18 pada 10-13 September 2021, menghadirkan paviliun dengan 20 perusahaan menampilkan makanan dan minuman, sarang burung walet, furnitur, dekorasi rumah, serta perhiasan sedangkan paviliun nasional digunakan untuk pertemuan bisnis, pertunjukan budaya, dan promosi merek.
3. CAEXPO ke-19 pada 16-19 2022, pada paviliun komoditas terdapat beberapa produk, seperti perhiasan, makanan dan minuman, pertanian dan kerajinan tangan, sementara paviliun nasional memamerkan produk unggul UMKM bina bank Indonesia dari berbagai provinsi, serta informasi produk yang tersedia di platform INAECPORT dan e-commerce IDNSTORE.
4. CAEXPO KE-20 16-19 Agustus 2023, Indonesia menghadirkan paviliun komoditas untuk menampilkan berbagai produk ekspor dan paviliun nasional yang difokuskan pada promosi budaya serta pariwisata domestik. Paviliun ini melibatkan 49 stan pelaku usaha mandiri, dan 49 paku usaha bina BUMN, serta delapan etalase produk unggulan dari provinsi Kalimantan Tengah. 49 paku usaha hasil bina BUMN menampilkan sebanyak 563 jenis produk UMKKN meliputi produk pakaian, kerajinan, home decor, produk kesehatan, dan kecantikan. Produk-produk ini merupakan karya PNM Mekar dari berbagai wilayah Indonesia, seperti batik laweyan khas solo, kerajinan bokor Denpasar, lukisan sokasi, kain tenun kombu, hingga kerajinan batok kelapa. Keikutsertaan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan sekaligus mendiversifikasikan ekspor ke Tiongkok, yang selama ini didominasi oleh produk hasil tambang dan kelapa sawit.

Partisipasi Indonesia dalam pameran CAEXPO setiap tahunnya menunjukkan komitmen negara untuk terus memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan negara-negara ASEAN lainnya melalui platform regional. Pameran ini menawarkan peluang bagi UMKM dan industri lokal untuk memperkenalkan produk mereka dalam lingkungan yang lebih terfokus dan terkontrol. Promosi produk UMKN dan komoditas ekspor yang lebih beragam, Indonesia tidak hanya dapat memperluas pasar, tetapi juga memastikan keberlanjutan pertumbuhan dengan menjaga perlindungan terhadap sektor0sektor tertentu yang masuk membutuhkan waktu untuk bersaing di pasar global. Dalam kerangka ACFTA regionalisme memungkinkan Indonesia memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok sambil melindungi sektor-sektor yang rentan terhadap kompetisi global, serta meningkatkan daya saing produk lokal Indonesia di pasar internasional yang lebih luas, sambil tetap memanfaatkan pasar yang lebih terlindungi di tingkat regional.

3.2.2. Regionalisme memberikan peluang untuk ‘integrasi yang lebih dalam’

Regionalisme memungkinkan kesepakatan pada isu-isu yang tidak bisa di capai oleh WTO, mendorong liberalisasi perdagangan dengan kerjasama lebih mendalam seperti investasi. ASEAN *China Free Trade Area* (ACFTA) dan *Belt and Road Initiative* Berkontribusi pada peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. ACFTA memberikan fasilitas perdagangan yang kemudian diperkuat melalui proyek proyek BRI. Perjanjian ACFTA menawarkan hukum kerangka kerja yang jelas dalam perdagangan dan investasi yang mendukung proyek proyek BRI dengan memberikan kepastian hukum terhadap

para investor dan pelaku usaha. Kerja sama Investasi ini di bawah kerangka kerja *Belt and Road Initiative* (BRI). Potensi kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI) bagi Indonesia akan difokuskan pada manufaktur teknologi baru seperti energi terbarukan, baterai, infrastruktur, teknologi informasi, pertambangan dan proyek strategis (Madrim 2023). Investasi Tiongkok di Indonesia terus mengalami peningkatan, mencapai USD 8,22 miliar 2022 dibandingkan USD 4,47 miliar pada 2019. Pada semester pertama 2023, realisasi investasi dari Tiongkok tercatat sebesar USD 3,8 miliar dengan jumlah tersebut, Tiongkok menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia.

Tiongkok telah memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam Forum *Belt and Road Initiative* 2023, pemerintah Indonesia dan Tiongkok menyepakati peningkatan kerjasama dalam inisiatif *Belt and Road Initiative* untuk masa depan. Kerjasama ini diharapkan memberikan dampak positif di bidang ekonomi, sosial, dan politik bagi kedua negara. Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa forum bisnis Indonesia - Tiongkok menghasilkan 31 kesepakatan kerjasama dengan nilai mencapai Rp 200 triliun. Selain itu, masih terdapat potensi kerja sama tambahan hingga Rp 455 triliun di. Salah satu proyek utama BRI di Indonesia adalah kereta cepat Jakarta Bandung dan berbagai sektor, termasuk infrastruktur, energi, manufaktur, dan pariwisata (Wisnubroto 2023).

Melalui perjanjian ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) memberikan perlindungan bagi investor dan investasi di ASEAN dan China dengan menciptakan lingkungan yang transparan, fasilitas, dan aman bagi investor. ACFTA memberikan peluang integrasi yang lebih mendalam melalui investasi *Belt and Road Initiative*.

Proyek-proyek strategis yang didukung oleh BRI dan difasilitasi oleh ACFTA tidak hanya menciptakan fondasi hukum yang jelas bagi perdagangan dan investasi, tetapi juga memberikan akses terhadap teknologi baru, pengembangan infrastruktur, dan penguatan sektor manufaktur. Bagi Indonesia hal tersebut membantu menciptakan sinergi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian domestik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan regionalisme dapat menjadi strategi efektif untuk mencapai kemajuan bersama di tengah dinamika ekonomi global.

3.2.3. Alasan ekonomi untuk lebih memilih regionalisme daripada unilateralisme atau status quo Pasar yang lebih besar dan peningkatan investasi asing

ACFTA merupakan kesepakatan antara negara ASEAN dan Tiongkok dalam mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif, peningkatan akses jasa, peraturan dan ketentuan investasi. ACFTA sebagai bentuk penguatan kerjasama ekonomi dalam meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Adanya perjanjian ACFTA dengan penghapusan tarif 94,6% untuk semua jalur tarif ekspor Indonesia ke Tiongkok memungkinkan untuk Indonesia dapat mengakses pasar Tiongkok dalam jangka yang lebih besar. Hal ini dapat membantu produk-produk Indonesia dalam menjangkau basis yang lebih luas, seperti komoditas agrikultur, manufaktur dll. Melalui hal tersebut dapat meningkatkan ekspor Indonesia yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik.

Adanya kepastian hukum dan penghapusan hambatan perdagangan regional ACFTA juga berfungsi sebagai daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di

negara-negara anggota, menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik dengan memberikan kepastian dan stabilitas bagi investor. Perjanjian ACFTA telah membawa investasi Indonesia bergabung dalam *Belt and Road Initiative*. *Belt and Road Initiative* sendiri memberikan banyak dorongan investasi di Indonesia, dalam memperbaiki infrastruktur di Indonesia, mendorong energi terbarukan Indonesia, dan kerjasama dalam bidang teknologi, hal ini tentunya tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. ACFTA sebagai regionalisme yang memberikan keuntungan ekonomi yang nyata bagi Indonesia seperti peningkatan ekspor Indonesia ke Tiongkok dan investasi dari Tiongkok dengan proyek-proyek yang membantu mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Indonesia masih mengimplementasikan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) pada tahun 2023 karena alasan strategis yang terkait dalam kepentingan ekonomi, perdagangan dan investasi. ACFTA merupakan perjanjian perdagangan untuk mempererat hubungan ekonomi antara negara ASEAN dan Tiongkok sebagai mitra dagang strategis. Tiongkok adalah salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia, kelanjutan ACFTA membantu menjaga stabilitas dan pertumbuhan perdagangan bilateral. Melalui pemanfaatan tarif Indonesia dapat memaksimalkan ekspor ke Tiongkok seperti ekspor kelapa sawit dan karet alam. ACFTA memberikan kerangka kerja yang mendukung investasi asing dengan menciptakan lingkungan investasi yang mana dan transparan. Indonesia masih mengimplementasikan ACFTA pada 2023 karena perjanjian ini memberikan keuntungan strategis dalam perdagangan, investasi dan pengembangan ekonomi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi regional.

Dalam mempermudah penjelasan, penulis menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 9, Motivasi Politik

No	Indikator Penerapan	Hasil Pembahasan
1	Faktor kerja sama Ekonomi dan Pembangun Kepercayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Alat untuk Membangun Kepercayaan: ACFTA berperan dalam meningkatkan hubungan antar negara melalui kerja sama ekonomi yang berkelanjutan, terutama di kawasan yang memiliki sejarah konflik.2. Manfaat dan Preferential Treatment: ACFTA memberikan perlakuan istimewa (<i>Preferential Treatment</i>) di tiga sektor utama: Barang, jasa dan investasi, yang

No	Indikator Penerapan	Hasil Pembahasan
		<p>memfasilitasi hubungan perdagangan dan memberikan keuntungan ekonomi bagi anggotanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hubungan Tiongkok-ASEAN Pasca Perang Dingin: Pasca Perang dingin, Tiongkok meningkatkan kerja sama politik dengan ASEAN melalui pendekatan multilateral dan bilateral. ACFTA menjadi salah satu bentuk kerja sama multilateral antara ASEAN dan Tiongkok. 4. Kerja sama Indonesia – Tiongkok 2019-2023: Hubungan bilateral berkembang pesat, dengan menandatangani 47 MoU di bidang perdagangan, investasi dan infrastruktur. 5. Pentingnya kerja sama ekonomi: Peningkatan signifikan dalam perdagangan dan investasi menunjukkan peran ekonomi dalam membangun kepercayaan antarnegara, mendukung peran ekonomi dalam membangun kepercayaan antarnegara, mendukung stabilitas kawasan, dan meningkatkan hubungan bilateral. Integrasi ekonomi melalui ACFTA menciptakan manfaat ekonomi dan mendukung tujuan politik serta keamanan di Asia Tenggara.
2	Faktor Regionalisme Sebagai Imbalan bagi Mitra Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama Tiongkok-ASEAN: Melalui ACFTA, Tiongkok mempererat aliansi politik dan ekonomi untuk menghadapi tantangan global serta menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. 2. Hubungan ekonomi yang erat menciptakan ekosistem yang mendukung stabilitas politik dan keamanan di kawasan. 3. Meskipun Indonesia tidak menerima penghargaan secara formal dalam ACFTA, manfaat strategis yang diperoleh, seperti peningkatan kerjasama ekonomi, dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi di kawasan.
3	Faktor kerja sama Ekonomi Regional dan Agenda Keamanan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Emisi Indonesia: Indonesia menjadi kontribusi emisi gas rumah kaca terutama karbon dioksida (CO₂), dari sektor energi, pertanian, transportasi dll, dengan salah satu penyumbang terbesar. 2. Strategi energi terbarukan: Pemerintah Berkomitmen mencapai emisi net zero melalui pengurangan dan penghapusan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai emisi net zero dengan mengoptimalkan energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, angin, bioenergi, dan panas bumi. 3. Kolaborasi Indonesia-Tiongkok di bidang energi: Indonesia meminta dukungan Tiongkok dalam pengembangan proyek energi terbarukan, termasuk saat <i>forum Belt and Road</i> di Beijing. Pada pertemuan 2023, Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping, PLN menandatangani tuju MoU dengan institusi besar Tiongkok, dengan nilai total lebih dari 54 miliar USD, untuk mendukung pembangunan energi terbarukan dan infrastruktur di Indonesia. 4. Pentingnya ACFTA dalam energi terbarukan: Implementasi penuh ACFTA sejak 2019 mendorong

No	Indikator Penerapan	Hasil Pembahasan
		<p>peluang kerja sama bilateral Indonesia-Tiongkok, Khususnya di sektor energi terbarukan. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan kedua negara, tetapi juga membantu strategi menghadapi ancaman keamanan non-tradisional seperti kerusakan lingkungan dan mendukung target emisi net zero Indonesia.</p>
4	Faktor Regionalisme sebagai alat Tawar Menawar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Energi domestik Indonesia: Tingginya kebutuhan energi domestik mendorong perubahan besar-besaran dalam sektor energi. Saat ini batu bara masih menjadi penopang utama dalam bauran energi untuk kebutuhan listrik domestik di Indonesia. Dibutuhkan pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. 2. Tiongkok sebagai pemasok energi terbarukan: Kementerian ESDM menyatakan perusahaan Tiongkok tertarik berinvestasi di sektor energi terbarukan di Indonesia, termasuk pembangunan pabrik panel surya. Kolaborasi antara LONGi (produsen panel surya Tiongkok) dan Utomo SolaRUV (distributor Indonesia) mendukung pengembangan PLTS atap untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23% pada 2025. 3. Pemanfaatan regionalisme oleh Tiongkok: Tiongkok memanfaatkan ACFTA sebagai alat tawar untuk meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, dengan menawarkan solusi energi efisien dan ramah lingkungan. Kerja sama ini diharapkan mempercepat proses transisi energi di Indonesia.
5	Faktor Regionalisme Sebagai Alat Untuk Mengunci Reformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya reformasi ekonomi: Reformasi ekonomi diperlukan untuk menghilangkan hambatan inefisiensi, memaksimalkan potensi ekonomi, dan menghilangkan berbagai faktor ekonomi dan politik. 2. Peran ACFTA dalam memfasilitasi investasi: Investasi asing langsung (FDI) menjadi elemen penting bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. ACFTA mempermudah aliran investasi antara ASEAN dan Tiongkok, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan investasi asing, khususnya di sektor infrastruktur dan ekonomi. 3. Proyek strategis kereta cepat Jakarta-Bandung: Salah satu hasil nyata kerja sama Indonesia-Tiongkok adalah proyek kereta cepat Jakarta Bandung, dengan biaya proyek USD 7,2 miliar, dengan 75% pendanaan dari Chian Development Bank. 4. Komitmen Indonesia pada reformasi ekonomi: Partisipasi dalam ACFTA menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi di sektor infrastruktur manufaktur, dan teknologi.
6	Faktor Regionalisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat ACFTA Untuk Indonesia: ACFTA bertujuan menghilangkan hambatan perdagangan, melalui ACFTA

No	Indikator Penerapan	Hasil Pembahasan
	Untuk Memenuhi Timbal Balik	<p>dapat mengurangi tarif, menghilangkan hambatan non tarif, meningkatkan ekspor ke Tiongkok.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Nota kesepahaman perdagangan produk pertanian dan perikanan antara Indonesia dan Tiongkok ditandatangani untuk merealisasikan hasil pertemuan bilateral kedua negara, termasuk juga didalam-Nya terkait ekspor kelapa sawit. Didalamnya juga terdapat penandatanganan kontrak untuk pembelian 2,5 juta ton CPO beserta produk turunanya 3. Ekspor kelapa Sawit: Kelapa sawit adalah komoditas utama ekonomi Indonesia, dengan Tiongkok sebagai pasar Ekspor utama terbesar pada tahun 2023 sebesar 7,7 juta ton. 4. Dampak ekonomi dari kerja sama Indonesia-Tiongkok: Peningkatan Ekspor kelapa sawit alam ke Tiongkok menciptakan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. 5. Signifikan timbal balik dalam hubungan dagang: Prinsip timbal balik menjadi dasar hubungan perdagangan Indonesia-Tiongkok, memberikan manfaat timbal balik di sektor minyak kelapa sawit. Hubungan timbal balik ini memperkuat kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara.
7	Kemudahan Negosiasi dan Implementasi ACFTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan tarif dan penyelesaian sengketa: Tarif untuk sebagian besar produk diturunkan bertahap, mengurangi biaya tambahan untuk perdagangan lintas negara. Mekanisme penyelesaian sengketa ACFTA memastikan penyelesaian masalah secara cepat, efektif, dan saling menguntungkan, menjaga stabilitas hubungan perdagangan. 2. Struktur dan kerangka kerja yang jelas: Kerangka kerja ACFTA memberikan pedoman yang jelas, memudahkan implementasi perdagangan antara negara. Inisiatif seperti One Step Center mempermudah akses dan pelaksanaan negosiasi, mendukung perdagangan bebas yang efisien. 3. ACFTA memberikan kemudahan implementasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kendala perdagangan antar anggota ASEAN dan Tiongkok. Struktur yang terorganisir membantu mengatasi keberagaman kepentingan dan memastikan efektivitas pelaksanaan kesepakatan.

Tabel 10, Motivasi ekonomi Regionalisme

NO	Indikator Penerapan	Hasil Pembahasan
1.	Alasan ekonomi dalam memilih regionalisme dibandingkan	1.CAEXPO sebagai platform strategis: CAEXPO sebagai pameran tahunan yang mempromosikan perdagangan, investasi, dan kerjasama antara Tiongkok dan

	<p>multilateralisme Regionalisme memungkinkan perlindungan berkelanjutan terhadap sektor-sektor yang tidak dapat bertahan dalam persaingan global.</p>	<p>negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dan Tiongkok. Pameran ini memperkuat implementasi ACFTA. 2. Keikutsertaan konsistensi Indonesia: Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam CAEXPO, menampilkan paviliun komoditas dan paviliun nasional setiap tahun untuk mempromosikan produk ekspor, budaya, serta pariwisata. 3. Dukungan bagi UMKM: Dalam setiap pameran CAEXPO Indonesia memfasilitasi pelaku UMKN untuk memamerkan produk mereka, seperti pakaian, kerajinan, dekorasi rumah, dan makan minuman. CAEXPO memungkinkan Indonesia menjaga keberlanjutan ekonomi, meningkatkan daya saingan produk lokal di pasar internasional, dan memanfaatkan pasar regional yang lebih aman bagi sebagai langkah awal menuju pasar global.</p>
2.	<p>Regionalisme memberikan peluang untuk integrasi yang lebih dalam</p>	<p>1. Pendekatan regionalisme efektif: ACFTA dan BRI membuktikan bahwa pendekatan regionalisme dapat menjadi strategi efektif untuk integrasi ekonomi lebih mendalam di kawasan. 2. proyek-proyek mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, menciptakan nilai tambah domestik, dan menjaga daya saing di tengah dinamika ekonomi global. 3. Melalui ACFTA dan BRI, Indonesia dan Tiongkok memperkuat hubungan bilateral, menciptakan peluang baru, serta memperkuat diplomasi ekonomi di tingkat kawasan.</p>
3.	<p>Alasan ekonomi untuk lebih memilih regionalisme dari pada unilateralisme atau status quo Pasar yang lebih besar dan peningkatan investasi asing</p>	<p>ACFTA memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Tiongkok dengan menghapus hambatan perdagangan, meningkatkan akses pasar, dan menarik investasi asing. Dengan sinergi bersama <i>Belt and Road Initiative</i>, ACFTA mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspor, pengembangan infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi, menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan dalam per</p>

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini, saya menyadari bahwa masih banyak aspek-aspek yang belum dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, saya menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat lebih berfokus pada topik pembahasan tertentu, seperti:

1. Dampak negatif akibat implementasi perjanjian ACFTA pada sektor-sektor di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Amaliawiati, Lia, and Asfia Murni. 2014. "Pengaruh ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Pada Perdagangan Indonesia." 931-944.
- Andika, Muhammad T., and Allya N. Aisyah. 2017. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?" *Indonesia Perspective* Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember).
- Apriliantini, Rezky, Ridzky H. Hanafi, and Akmal Mahendra. Juni. "Dampak ACFTA Terhadap Kinerja Perekonomina China." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.28, no.1 (2023): 13-25.
- Arimbhi, Pebriana, and Yusuf Hutapea. 2016. "Implementasi Kebijakan ACFTA (ASEAN- Free Trade Area) di Kantor Pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe: A Tanjung Priok." *Jurnal Ilmiah* Vol. 3, No. 1 (Maret).
- Astatiani, Amalia. 2023. "Dampak Pelaksanaan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreemeent) Pada FDI Ektra-Regional di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Global Education* Vol. 1, No. 1:735-746.
- Dwiguna, Adrianus R. 2019. "Revitalisasi Amerika Serikat - Tiongkok di Laut China Selatan dan Pengaruhna Terhadap Indonesia." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* Vol. 2, No. 2.
- Firdaus, Rindu S. 2013. "Khasanah Kedaulatan dalam Regionalisme di Era Globalisasi (Studi Kasus Implementasi ACFTA di Indonesia)." *Jurnal Ketahanan Nasional*, (Agustus), 73-78.
- Habibi, Muhtar. 2011. "Memahami ACFTA dari Perspektif 'Masyarakat Jaringan.'"

- Jurnal Kajian Wilayah* Vol. 2, No. 1:100-104.
- Haerulloh, Aziz A., and Rifqi F. Martani. 2023. "Analisis Geopolitik Abad 21 di Indo-Pasifik dan Persiapan Indonesia dalam Menyikapi Konflik di Laut Cina Selatan." *Jurnal Lemhannas RI* Vol.11, No.3:187-201.
- Hanifah, Abu F., and Rusdiyanta. n.d. "Strategi Cina dalam Mewujudkan Hegemoni Ekonomi di ASEAN Melalui E-Commerce."
- Julina, Sinta. 2022. "ACFTA (ASEAN- *Free Trade Area*): Menguntungkan atau Merugikan Indonesia? Ditinjau dari Perspektif Neoliberalisme." *Jurnal Alternatif* Vol. 2, No. 1:4-6.
- Kartikasari, Elisabeth. n.d. "Respons Indonesia Terhadap ACFTA: Pro Kontra Wacana Renegosiasi." 138-140.
- Khaldun, Riady I. 2022. "Peran Penting Pemerintah Indonesia Untuk Memanfaatkan Kembali Kesempatan dalam ACFTA." *Jurnal Sosial Politik* Vol. 5, No. 2.
- L.Toruan, Gerald T. 2020. "Peran Staregis Inonesia dalam Penyelsaian Konflik Luat China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Kemanan Regional." *Jurnal Kemanan Nasional* Vol. 6, No. 1 (Mei).
- Lubis, Adrian D., and Sri Nuryanti. 2011. "Analisis Dampak ACFTA dan Kebijakan Perdagangan Kakao di Pasar Domestik dan China." *Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 9, No. 2 (Juni): 143-156.
- Maulanasyah, Ahmad B., Sindy Y. Putri, and Nurmasari Situmeang. 2023. "Strategi Pemerintah Indonesia dalam Membatasi Impor Telepon Genggam Tiongkok Berlebihan Pasca Kerja Sama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Periode 2018-2021." *Jurnal Ilmiah Wahana*

Pendidikan Vol. 9, No. 17 (September): 941-955.

- Nadya, Annissa, Elshadai Trihandayani, I Gusti A. Usha, Maria Agnetha, Theofilia P. Soukotta, and Sepril Melani. 2018. "Tiongkok Sebagai Pemimpin Dunia Baru Melalui Investasi di Negara-Negara di Dunia." *Jurnal Asia Pacific Studies* Vol. 2, No. 2 (July - Desember): 202-213.
- Nawawi. 2010. "ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Realitas Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia." *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* No. 2:25-47.
- Nugraha, Calista L. 2018. "Penguatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok di ASEAN Melalui ACFTA *Upgrading Protocol*." *Journal of International Relations* Vol. 5, No. 1 (November): 68.
- Nurhasya, Muhamad J. 2018. "Konsepsi Indo-Pasifik sebagai Sebuah Strategi Ketahanan Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, (Maret), 65-76.
- Nusa, Sarah N., Irma H. Hanafi, and Popi Tuhulele. 2023. "Peran Association Of South East Asian Nations (ASEAN) Dalam Mneyelsiakn Sengketa Laut China Selatan." Vol. 1 , No. 2 (Desember).
- Pratiwi, Kevina E. n.d. "Dampak Masuknya Produk Cina dalam ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagai Penyebab Kerugian Sektor Hortikultura Indonesia."
- Rahman B, Aulia, Baso Iwang, and Amira Taqiya. 2022. "Analisis implementasi CAFTA terhadap komoditas tekstil di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 19 (3).
- Saputra, Panggih P. 2023. "Pengaruh Implementasi Kebijakan One Belt - One

- Road (OBOR) Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia - Tiongkok.”
Journal of Student Research (JSR) Vol. 1, No. 3 (Mei): 379-392.
- Setiawan, Asep, Endang Sulastris, Eka Aprianto, and Iqbal Maulana. n.d. “Analisis Diplomasi Ekonomi Indonesia Ke Asia Tengah.” 1-2.
- Suhartono, Suhartono. 2016. “Peran Pemerintah dan Kebijakan Perdagangan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau.” Vol. 16, No. 3:545-569.
- Sulistiyani, Yuli A., Anzhini C. Pertiwi, and Marina I. Sari. 2021. “Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute Joko Widodo's Administration.” Vol. 12, No. 1 (Mei).
- Suryani, Anih S. 2021. “Menuju Net Zero Emmissions Indonesia.” *Bidang Kesejahteraan Sosial* Vol. 13, No. 11 (Juni): 13-18.
- Syahdani, Muwalliha. 2021. “Regionalisme Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Sebuah Perspektif.” *Internasional Relations Journal* Vol. 1, No. 1.
- Tresia O, Wezi. 2014. “Efektivitas Pemberlakuan ASEAN- Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Pasar Industri Kosmetik Indonesia.” *Jom FISIP* Vol. 1, No. 2 (Oktober).
- Utomo, Bagus W., Marsetio, Rudiyanto, Pujo Widodo, Herlina J. Saragih, and Panji Suwarno. 2023. “Kontribusi Indonesia dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 1 (Juni): 143-153.
- Utomo, Bagus W., Marsetio, Rudiyanto, Pujo Widodo, Herlina J. Saragih, and Panji Suwarno. 2023. “Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum.” *Jurnal*

Kewarganegaraan Vol. 7, No 1 (Juni): 143-153.

Widyasanti, Amalia A. 2010. “Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia.” Vol. 13, No. 1:5-22.

Wijaya, Handriyanto. 2020. “Aktualisasi Kebijakan China One Belt Road di Indonesia Melalui Pembangunan Kreta Cepat Jakarta-Bandung.” *Jurnal Dinamika Global* Vol. 5, No. 1 (Juni): 109-122.

Yuliansyah, Reky, Trianda Lestari, and Syahrando Muhti. 2024. “Perbandingan Hukum Penanaman Modal dan Investasi di Inonesia dan Tiongkok.” *Jurnal Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* Vol. 2, No. 2 (Juli): 210-225.

Buku

Karina, Eva N., and Vinie Puspaningrum. 2014. *Diplomasi Ekonomi Indonesia antara Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans-Pacific Partnership (TPP)*. Yogyakarta, Indonesia: Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM BulaksumurC-7.

Ravenhill, Director of the Balsillie School of International Affairs and Professor of Political Science J., and John Ravenhill, eds. 2020. *Global Political Economy*. N.p.: Oxford University Press, Incorporated.

Artikel Daring

(2009, Desember 16). hukumonline.com. Retrieved May 10, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-putusan-terlibat-dalam-acfta-lt4b283abf1f01b/> .

“10 Barang Ekspor-Impor November 2019, Produknya Apa Saja?” 2019. CNBC

- Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191217102923-4-123653/10-barang-ekspor-impor-november-2019-produknya-apa-saja>.
- “ACFTA.” 2019. FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/acfta>.
- “Kemenperin: ACFTA Bisa Menguntungkan.” 2011. Kementerian Perindustrian. <https://kemenperin.go.id/artikel/1062/ACFTABisaMenguntungkan>.
- “Kemenperin: DPR Minta FTA ASEAN- Dinegosiasikan Ulang.” 2009. Kementerian Perindustrian. <https://kemenperin.go.id/artikel/1355/DPR-Minta-FTA-ASEAN--Dinegosiasikan-Ulang>.
- “Kemenperin: Perkembangan Pelaksanaan Perdagangan ACFTA Tahun 2010 Di Sektor Industri.” 2011. Kementerian Perindustrian. <https://kemenperin.go.id/artikel/42/Perkembangan-Pelaksanaan-Perdagangan-ACFTA-Tahun-2010--Di-Sektor-Industri>.
- “Kereta Cepat Indonesia-China: Kemitraan Infrastruktur yang Menghubungkan Dua Negara Lewat Frekuensi Radio - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang.” 2023. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang. <https://balmonsemarang.postel.go.id/kereta-cepat-indonesia-china-kemitraan-infrastruktur-yang-menghubungkan-dua-negara-lewat-frekuensi-radio/>.
- “Keuntungan yang Diperoleh dari ACFTA Lebih Besar Dibandingkan dengan Kerugiannya – Tabloid Diplomasi.” 2011. Tabloid Diplomasi. <https://www.tabloiddiplomasi.org/keuntungan-yang-diperoleh-dari-acfta-lebih-besar-dibandingkan-dengan-kerugiannya/>.
- “Peneliti UGM: ACFTA Peluang Bagi Indonesia.” 2011. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/3250-peneliti-ugm-acfta-peluang-bagi-indonesi>.

- “Penguatan Kerja Sama Indonesia-China: Langkah Menuju Hub Manufaktur Energi Terbarukan -.” 2024. Dana Mitra Lingkungan.
<https://www.dml.or.id/penguatan-kerja-sama-indonesia-china-langkah-menuju-hub-manufaktur-energi-terbarukan/>.
- “Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2017.” n.d. Sekretariat Website JDIH BPK. Accessed May 13, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/112613/pmk-no-26pmk0102017>.
- “Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2008.” n.d. Sekretariat Website JDIH BPK. Accessed May 13, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/42262/perpres-no-18-tahun-2008>.
- “Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2013.” n.d. Sekretariat Website JDIH BPK. Accessed May 13, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41400/perpres-no-30-tahun-2013>.
- “Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2010.” n.d. Sekretariat Website JDIH BPK. Accessed May 13, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41131/perpres-no-57-tahun-2010>.
- “PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015.” n.d. Accessed May 13, 2024. <https://peraturan.go.id/files/ps50-2015.pdf>.
- “PERDAGANGAN ASEAN- SEBELUM DAN SETELAH IMPLEMENTASI ACFTA PERIODE 2013-2022.” 2023. Satu Data Perdagangan.
<https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/negara/perdagangan-asean--2013-2022>.
- “PERDAGANGAN BILATERAL INDONESIA-REP. RAKYAT CINA

PERIODE 2018-2023 (JANUARI-MARET).” n.d. Satu Data

Perdagangan. Accessed May 16, 2024.

<https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/negara/perdagangan-bilateral-indonesia--periode-2018-2023-januari-maret>.

“Sarang Burung & 9 Barang Andalan Ekspor RI ke .” 2020. CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116164239-4-202203/sarang-burung-9-barang-andalan-ekspor-ri-ke->.

“SEKILAS TENTANG FTA.” 2023. FTA Center.

<https://ftacenter.kemendag.go.id/sekilas-tentang-fta>.

ACFTA. n.d. “AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF

THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE

ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIAT.” FTA

Center. Accessed November 15, 2024.

<https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/acfta/asean-china-dispute-settlemen-mechanism.pdf>.

ASEAN. 2023. “ASEAN-China Initiative on Enhancing Cooperation on E-

Commerce As one of the most dynamic economic activities globally, e-commer.” Asean.org. [https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/ASEAN_China_ECommerce_Initiative_Adopted](https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/ASEAN_China_ECommerce_Initiative_Adopted.pdf)

[.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/ASEAN_China_ECommerce_Initiative_Adopted.pdf).

Asmarini, Wilda. 2023. “PLN Gaet Perusahaan China Garap Proyek Energi

Bersih Rp 848 T.” CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231017161825-4-481321/pln-gaet-perusahaan-china-garap-proyek-energi-bersih-rp-848-t>.

- Badan Pusat Statistik. 2024. "Neraca Perdagangan beberapa Negara - Tabel Statistik." bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzM2IzI=/neraca-perdagangan-beberapa-negara.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. "Neraca Perdagangan beberapa Negara (Juta US\$), 2021-2023." bps.go.id. Neraca Perdagangan beberapa Negara (Juta US\$) , 2021-2023.
- Busat Statistik. 2024. "Neraca perdagangan beberapa Negara." bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzM2IzI=/neraca-perdagangan-beberapa-negara.html>.
- Darmawan, Agus D. 2024. "Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Cina." Databoks. https://databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/31e97062b72dc8f/inilah-produk-yang-banyak-diimpor-indonesia-dari-cina#goog_rewarded.
- Fajar. 2019. "Pertemuan Bilateral Indonesia-China Tingkatkan Ekspor Produk Potensial ke China." disperindag.jatimprov.go.id. <https://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=pertemuan-bilateral-indonesia-china-tingkatkan-ekspor-produk-potensial-ke-china>.
- Fitria, Nurul. 2024. "Indonesia Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar ke-8 di Dunia." Jikalauhari. <https://jikalauhari.or.id/kabar/klipingberita/indonesia-penyumbang-emisi-gas-rumah-kaca-terbesar-ke-8-di-dunia/>.

FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S. (n.d.). ASEAN.org. Retrieved May 10,

2024, from

<https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/acfta/framework-agreement-on-comprehensive-economic-co-operation-between-asean-and-.pdf>.

Gareta, Sella P. 2024. "Genjot Ekspor ke Tiongkok, Mendag Luncurkan Platform Dagang Digital." [antaranews.com](https://www.antaranews.com).

<https://www.antaranews.com/berita/1946096/genjot-ekspor-ke-tiongkok-mendag-luncurkan-platform-dagang-digital>.

Green Finance & Development Center. 2024. "China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2023." [greenfdc](https://www.greenfdc.org).

<https://search.app/KGqGcxnxTw3WZfUZ6>.

Handayani, Indah. 2022. "LONGi Gandeng Utomo SolaRUV Garap Potensi Panen Setrum di Indonesia." [Investor.id](https://www.investor.id).

<https://search.app/zwSTXVCtTKdQ9erm8>.

Handoyo, and Rashif Usman. 2024. "Nilai Investasi China di Indonesia Capai US\$ 30,2 miliar Sejak 5 Tahun Terakhir." [Nasional Konta](https://www.nasional.kontan.co.id).

<https://nasional.kontan.co.id/news/nilai-investasi-china-di-indonesia-capai-us-302-miliar-sejak-5-tahun-terakhir>.

Ikhsanudin, Arief. 2024. "China Pastikan Konflik Laut China Selatan

Diselesaikan dengan Dialog." [detikNews](https://news.detik.com/berita/d-7580944/china-pastikan-konflik-laut-china-selatan-diselesaikan-dengan-dialog/amp). <https://news.detik.com/berita/d-7580944/china-pastikan-konflik-laut-china-selatan-diselesaikan-dengan-dialog/amp>.

Insanto, Bayu A. 2023. "Inilah 10 Faktor Pendorong Perdagangan

Internasional." [Detikedu](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-). <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d->

6737143/inilah-10-faktor-pendorong-perdagangan-internasional.

Jati, Eko S. 2022. “Menelusuri Perjalanan Minyak Sawit dari Inodonesia ke Tiongkok.” WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/insights/tracing-palm-oil-journey-indonesia-china>.

Julita S, Lidya. 2020. “Sarang Burung & 9 Barang Andalan Ekspor RI ke China.” CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116164239-4-202203/sarang-burung-9-barang-andalan-ekspor-ri-ke-china>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2023. “Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Sepakati Kerja sama di Bidang Ekonomi Digital.”

[ekon.go.id. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5374/indonesia-dan-republik-rakyat-tiongkok-sepakati-kerja-sama-di-bidang-ekonomi-digital](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5374/indonesia-dan-republik-rakyat-tiongkok-sepakati-kerja-sama-di-bidang-ekonomi-digital).

Kementrian Perdagangan RI. 2023. “Pembukaan ASEAN-Indo-Pacific Forum.”

[kemendag.go.id. https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pembukaan-asean-indo-pacific-forum](https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pembukaan-asean-indo-pacific-forum) .

Kementrian Perdagangan RI. 2023. “Memakau di The 20th CAEXPO 2023,

Produk Indonesia Raup Potensi Transaksi Rp106,46 miliar.”

[Kemendag.go.id. https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/memukau-di-the-20th-caexpo-2023-produk-indonesia-raup-potensi-transaksi-rp10645-miliar](https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/memukau-di-the-20th-caexpo-2023-produk-indonesia-raup-potensi-transaksi-rp10645-miliar).

Kementrian Perdagangan. 2023. “Perdagangn ASEAN-Indonesia Sebelum dan Sesudah ATIGA.” [Satudata.kemendag.go.id](https://satudata.kemendag.go.id).

<https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/negara/perdagangan-asean-indonesia-sebelum-dan-sesudah-atiga-periode-tahun-2018-2023-januari->

agustus.

Kementrian Perdagangan. 2024. "Realisasi Ekspor Karet dan Produk Karet Indonesia 2019-2024 (Januari)." satudata.kemendag.go.id.
<https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/realisasi-ekspor-karet-dan-produk-karet-indonesia-2018-2023-januari-mei>.

Komalasari, Tia D. 2023. "Jokowi Akan Bujuk Cina Garap Poryek Energi Terbaru di Indonesia." Katadata.
https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fkatadata%2Eco%2Eid%2F&utm_campaign=57165%2Dor%2Digacx%2Dweb%2Dshrbtn%2Diga%2Dsharing&utm_source=igadl%2Cigatpd%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm%2F5.

Kusnandar, Viva B. 2022. "Inilah 5 Kelompok Barang Impor dari Tiongkok Dengan Nilai Terbesar (Jan-Nov 2021)." Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/d8eed648031c0da/inilah-5-kelompok-barang-impor-dari-tiongkok-dengan-nilai-terbesar-jan-nov-2021>.

Kusnandar, Viva B. 2023. "Januari-November 2022, Nilai Ekspor Nikel Indonesia ke Tiongkok Tembus Rp60 Triliun." Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/0addb6316e55bf3/januari-november-2022-nilai-ekspor-nikel-indonesia-ke-tiongkok-tembus-rp60-triliun>.

Madrim, Sasmito. 2023. "Dubes Indonesia untuk China: Nilai Investasi China sejak 2019." Voa Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/dubes-indonesia-untuk-china-nilai-investasi-china-naik-sejak-2019/7331656.html>.

- Madyan, Muhammad. 2024. "Ansisis Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan Indonesia." Univeristas Airlangga. <https://unair.ac.id/analisis-pengungkapan-emisi-karbon-perusahaan-indonesia/>.
- Mahardika, Lorenzo A. 2023. "Telan Investasi Rp110 Triliun, Kereta Cepat Whoosh Balik Modal 40 Tahun." *ekonomi.bisnis*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231003/98/1700575/telan-investasi-rp110-triliun-kereta-cepat-whoosh-balik-modal-40-tahun>.
- Medistiara, Yaulida. 2023. "Mahfud Ungkap Upaya ASEAN Atasi Konflik di Laut China Selatan." *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6821231/mahfud-ungkap-upaya-asean-atasi-konflik-di-laut-china-selatan/amp>.
- Mulyana, Ridwan N. 2019. "Pengamat Sebut Pemerintah Bisa Memanfaatkan China's Belt and Road Initiative BRI." *amp.kontan.co.id*.
<https://amp.kontan.co.id/news/pengamat-sebut-pemerintah-bisa-memanfaatkan-chinas-belt-and-road-initiative-bri>.
- Nugroho, Rosseno A. 2024. "Produk Kebanggaan Jokowi ini alasan RI Bikin China Keok." *cnbcIndonesia.com*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240115145052-4-505787/produk-kebanggaan-jokowi-ini-alasan-ri-bikin-china-keok>.
- Parandaru, Inggra. 2024. "Sengketa Laut China Selatan dan Ancaman Kedaulatan Indonesia – Kompaspedia." *Kompaspedia*.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengketa-laut-china-selatan-danancaman-kedaulatan-indonesia>.
- Portal Jabarprovgoid. 2023. "Kembangkan EBT, PLN Gandeng 9 Perusahaan di

ICBF China 2023.” Jabarprov. <https://jabarprov.go.id/berita/kembangkan-ebt-pln-gandeng-9-perusahaan-di-icbf-china-2023-11012>.

Prasetyo, Andhika. 2019. “Indonesia Terus Buka Akses Pasar Lebih ke Tiongkok.” Media Indoensia. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/260873/indonesia-terus-buka-akses-pasar-lebih-besar-ke-tiongkok>.

Samuel, Gading. 2024. “Investor China Ternayat Banyak Bangun Smelter di RI.” detikfinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7133278/investor-china-ternyata-banyak-bangun-smelter-di-ri>.

Second Protocol to Amend The Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operations Between The Association of Southeast Asian Nations and The People’s Republic of . (n.d.). Wikipedia. Retrieved May 10, 2024, from <https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/acfta/2nd-protocol-to-amend-the-framework-agreement-acfta.pdf>.

Sekretarian Kabinet Republik Indonesia. n.d. “KTT Ke-26 ASEAN-RRT Hasilkn Kesepakatan kerja Sama Berbagai Bidang.” Setkan.go.id. KTT Ke-26 ASEAN-RRT Hasilkan Kesepakatan Kerja Sama Berbagai Sektor Read more: [https://setkab.go.id/ktt-ke-26-asean-rrt-hasilkan-kesepakatan-kerja-sama-berbagai-sektor/KTT Ke-26 ASEAN-RRT Hasilkan Kesepakatan Kerja Sama Berbagai Sektor Read more: https://s.](https://setkab.go.id/ktt-ke-26-asean-rrt-hasilkan-kesepakatan-kerja-sama-berbagai-sektor/KTT-Ke-26-ASEAN-RRT-Hasilkan-Kesepakatan-Kerja-Sama-Berbagai-Sektor-Read-more)

Sekretarian Kabinet. 2023. “KTT Ke-11 ASEAN-AS Adopsi Dokumen Dukungan Kerja Sama dalam AOIP.” Sekretariat Kabinet. <https://setkab.go.id/ktt-ke-11-asean-as-adopsi-dokumen-dukungan-kerja->

sama-dalam-aoip/.

Setiawan, Susi. 2023. "Soal Ekspor ke China, RI Gak Ada Lawan di ASEAN."

CNBC Indonesia.

[https://www.cnbcindonesia.com/research/20230904104954-128-](https://www.cnbcindonesia.com/research/20230904104954-128-468815/soal-ekspor-ke-china-ri-gak-ada-lawan-di-asean)

[468815/soal-ekspor-ke-china-ri-gak-ada-lawan-di-asean.](https://www.cnbcindonesia.com/research/20230904104954-128-468815/soal-ekspor-ke-china-ri-gak-ada-lawan-di-asean)

Sugiarto, Eddy C. 2019. "Ekonomi Digital: The New Face Of Indonesia,s

Economy." Setneg.go.Id.

https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_i

[ndonesias_economy.](https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_i)

*THIRD PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON
COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S
REPUBLIC OC . (n.d.). ASEAN.org. Retrieved May 10, 2024, from
[https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/acfta/3rd-protocol-to-
amend-the-framework-agreement-acfta.pdf](https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/acfta/3rd-protocol-to-amend-the-framework-agreement-acfta.pdf).*

Usman, Rashif. 2024. "Naik Tinggi, Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke Chian

Tembus 7,7 Juta Ton pada 2023." Konta.co.id.

[https://search.app/7RJjCkCfQ9T82yVKA.](https://search.app/7RJjCkCfQ9T82yVKA)

Utomodeck. 2023. "PT Utomodeck Grup Gandeng Sungrow Power Supply Garap

Potensi PLTS di Indonesia." utomodeck.

[https://search.app/yfaRsqPTUr4RmfLd6.](https://search.app/yfaRsqPTUr4RmfLd6)

Yanwardhana, Emir. 2023. "Kereta Cepat JKT-BDG! Biaya Rp.108 Triliun, Tiket

Rp 250 Ribu." cnbcindonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230815185639-4-463263/kereta->

cepat-jkt-bdg-biaya-rp-108-triliun-tiket-rp-250-ribu.

- Yurika. 2024. "Kemitraan Indonesia-Tiongkok Peluang Percepatan Transisi Energi." Dunia-energi.com. <https://search.app/WEmQXDkw7HQU5Tde6>.
- Zahra, Daniyah A., and Eko S. Kusumo. 2022. "Menelusuri Perjalanan Minyak Sawit dari Indonesia ke Tiongkok." WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/insights/tracing-palm-oil-journey-indonesia-china>.
- Agustinus, Michael, and Wendiyanti Saputra. 2020. "Indonesia Bawa Pulang Rp 215,9 Miliar dari China-ASEAN EXPO." Kumparan Bisnis. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/indonesia-bawa-pulang-rp-215-9-miliar-dari-china-asean-expo-1uhhev7REuT/full>.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2023. "Indonesia-Tiongkok Tingkatkan Hubungan dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Sakala Global." BRIN. <https://www.brin.go.id/news/116170/indonesia-tiongkok-tingkatkan-hubungan-dalam-proyek-pembangunan-infrastruktur-skala-global>.
- Ilmie, M. Irfan, and Fardah Assegaf. 2022. "Indonesia bukukan transaksi Rp23,3 triliun dari CAExpo di Nanning." Antaranews. https://www.antaranews.com/berita/3137685/indonesia-bukukan-transaksi-rp233-triliun-dari-caexpo-di-nanning#google_vignette.
- Kementerian Perdagangan. n.d. "Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Perdagangan dan Kontrak Dagang Produk Pertanian dan Perikanan antara Pelaku Usaha Indonesia dan Tiongkok." Kemendag. <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/penandatanganan-nota-kesepahaman-kerja-sama-perdagangan-dan-kontrak-dagang-produk->

pertanian-dan-perikanan-antara-pelaku-usaha-indonesia-dan-tiongkok.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2021. "Ikuti Pameran CAEXPO 2021, Indonesia Perkuat Penetrasi Pasar RRT dan ASEAN." Kemendag. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/ikuti-pameran-caexpo-2021-indonesia-perkuat-penetrasi-pasar-rrt-dan-asean>.

Madrim, Sasmito. 2023. "Dubes Indonesia untuk China: Nilai Investasi China Naik Sejak 2019." VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/dubes-indonesia-untuk-china-nilai-investasi-china-naik-sejak-2019/7331656.html>.

Suswanto, Junaydi. 2023. "Produk Indonesia Berpotensi raup Rp106 miliar dari CAEXPO 2023." Antaranews. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/09/25/ikuti-ajang-china-asean-expo-di-nanning-indonesia-bawa-pulang-rp-233-triliun>.

Sutriyanto, Eko, and Hendra Gunawan. 2022. "Ikuti Ajang China-ASEAN Expo Nanning, Indonesia Bawa Pulang Triliun." Tribun Bisnis. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/09/25/ikuti-ajang-china-asean-expo-di-nanning-indonesia-bawa-pulang-rp-233-triliun>.

Wisnubroto, Kristantyo. 2023. "Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kerjasama dan Investasi." Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7686/indonesia-and-china-to-reinforce-cooperation-and-investment-in-infrastructure-energy-manufacturing-and-tourism?lang=2>.